



**PROVINSI
ACEH
2021**

**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**



**PROVINSI
ACEH
2021**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH 2021

ISSN : 2477-4650
Nomor Publikasi : 11000.2215
Katalog BPS : 4102002.11
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 60 halaman

Naskah

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Penyelaras Akhir

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Gambar Kulit

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Pengarah **Nuriah Ismail, S.E.** Editor **TASDIK ILHAMUDDIN, S.Si, M.Si** Penyusun **Dr. AZWAR, M.Si.**

Pengolah Data **Dr. AZWAR, M.Si** Perancang Tata Letak **Dr. AZWAR, M.Si** Perancang Sampul **CAHYA DANU RAHMAN, S.ST.**

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indeks ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Indikator- indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian angka IPM dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Sehingga diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk dan pembangunan manusianya.

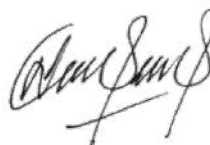
IPM Aceh dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih memerlukan perhatian yang serius disebabkan masih tingginya disparitas pencapaian pembangunan antarkabupaten/kota.

Publikasi IPM Provinsi Aceh 2021 ini mendeskripsikan capaian IPM Provinsi Aceh sejak tahun 2011 hingga 2021. Penyajian data dan analisis yang tercakup di dalamnya bertujuan memberi gambaran kondisi pembangunan manusia Provinsi Aceh sampai ke lingkup kabupaten/kota.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Banda Aceh, April 2022

**Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh**



Nuriah Ismail, S.E.

Halaman ini sengaja dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report 1990*).

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM kali pertama pada tahun 1990. Hingga tahun 2021, *UNDP* telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010 yang disebut dengan era baru pembangunan manusia. *UNDP* memperkenalkan dua indikator baru yang sekaligus menggantikan dua indikator metode lama. Indikator harapan lama sekolah menggantikan indikator melek huruf, sementara Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Di Indonesia, IPM mulai dihitung pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Sejak tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Aceh sampai saat ini mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 2014 dengan angka backcasting dari tahun 2010.

Badan Pusat Statistik mencatat IPM Provinsi Aceh pada tahun 2021 telah mencapai 72,18, meningkat sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2016, Aceh telah menempatkan diri sebagai wilayah dengan status pembangunan manusia “tinggi”. Status ini merupakan babak baru dalam pembangunan kualitas manusia khususnya di Provinsi Aceh. Umur Harapan Hidup saat lahir di Aceh saat ini

mencapai 69,96 tahun. Ini berarti bahwa hidup bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 69,96 tahun. Secara rata-rata, penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 9,37 tahun masa sekolah atau setara kelas 1 SMA. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 14,36 tahun, setara dengan D-III atau memasuki semester VI pada jenjang pendidikan Strata I. Tidak kalah penting, standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp 9,572 juta per kapita per tahun, mengalami peningkatan dibanding 2020 tercatat Rp 9,462 juta.

Secara umum, kualitas manusia di masing-masing kabupaten/kota di Aceh yang diukur melalui IPM terlihat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan agregat IPM Aceh. Hal ini terlihat dari perkembangan selama beberapa tahun terakhir. Semenjak tahun 2013, sudah tidak ada lagi kabupaten/kota di Aceh dengan status pembangunan manusia tergolong “rendah”. Pada Tahun 2021, tidak terdapat kabupaten/kota yang berubah status dari kategori “sedang” ke “tinggi” sehingga sama halnya dengan 2020 kabupaten/kota yang masuk kategori tinggi mencapai 10 kabupaten/kota, sedang 12 kabupaten/kota, sedangkan sangat tinggi ada satu, yaitu kota Banda Aceh.

Dalam kurun waktu 2011 hingga 2021, pembangunan manusia di Aceh menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Kapabilitas dasar juga berhasil ditingkatkan tetapi dengan beberapa tantangan yang masih harus dihadapi di masa mendatang. Di bidang pendidikan, partisipasi pendidikan di setiap jenjangnya cukup tinggi dengan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Minat siswa untuk melanjutkan ke SMP atau SMA masih cukup tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa putus sekolah masih terjadi, tercatat angka partisipasi sekolah (APS) untuk SMP 98,42 persen, bermakna masih ada 1,58 persen belum mencapai target pemerintah dalam program wajib belajar sembilan tahun. Demikian juga halnya dengan tingkat SMA tercatat APS sebesar 83,28 persen menunjukkan bahwa terdapat 16,72 persen belum dapat melanjutkan ke jenjang SMA. Pada bidang kesehatan, status kesehatan dan kualitas lingkungan tempat tinggal penduduk Aceh cenderung meningkat ditunjukkan semakin menurunnya angka kesakitan penduduk dan meningkatnya kualitas beberapa indikator tempat tinggal seperti sanitasi, kualitas tempat pembuangan yang layak, serta kualitas air bersih.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR SINGKATAN

ABH	Angka Buta Huruf
AHS	Angka Harapan Sekolah
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	Association of South East Asian Nations
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
GNP	Gross National Product
HDI	Human Development Index
HLS	Harapan Lama Sekolah
HDR	Human Development Report
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
SDG's	Sustainable Development Goals
MYS	Mean Years of Schooling
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PJP	Pembangunan Jangka Panjang
Podes	Potensi Desa
PPP	Purchasing Power Parity
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	Umur Harapan Hidup
UNDP	United Nations Development Programme
UUD	Undang-Undang Dasar

<http://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH	5
2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Provinsi Aceh.....	7
2.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota	12
BAB 3 PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA.....	19
3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan.....	21
3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan.....	24
3.3 Capaian dan Tantangan di Bidang Ekonomi	28
BAB 4 DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH	31
4.1 Disparitas IPM antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh	33
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	41
Catatan Teknis.....	49

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal
2.1	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2011-2021	13
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status Pencapaian IPM, 2017, 2019, 2021	16
2.3	Enam Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2011-2021	17
2.4	Enam Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2011-2021	18
3.1	Disparitas Angka Partisipasi Sekolah antarkabupaten/kota, 2019-2021	22

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

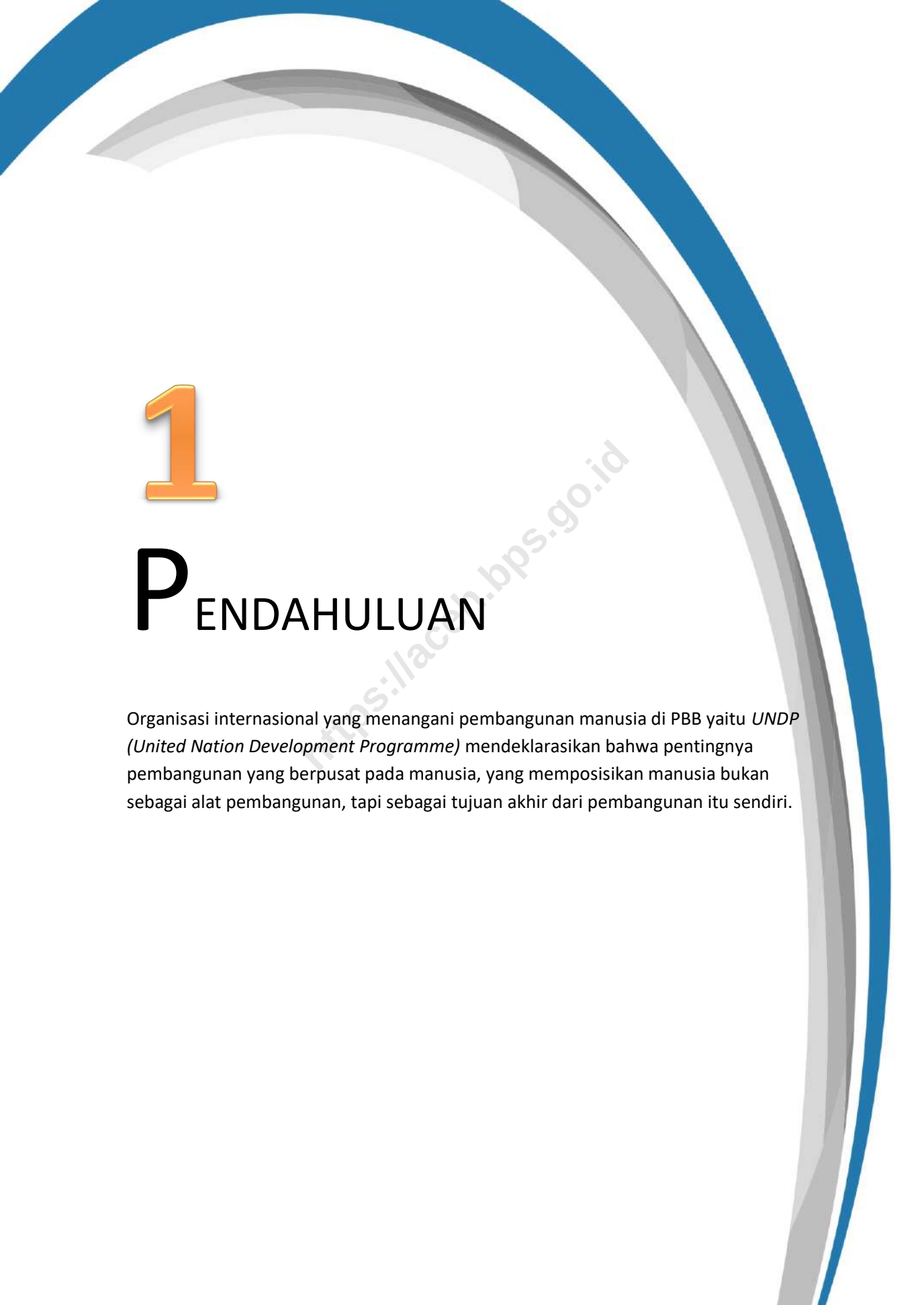
No.	Judul Gambar	Hal
2.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh, 2010-2021	7
2.2	Pertumbuhan IPM Provinsi Aceh, 2011-2021	8
2.3	Umur Harapan Hidup Provinsi Aceh, 2010-2021	9
2.4	Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2021	10
2.5	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2021	11
2.6	Pengeluaran Per kapita Per Tahun Provinsi Aceh, 2010-2021	12
2.7	Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota, 2010-2021	15
3.1	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh, 2013-2021	21
3.2	Angka Kesakitan Penduduk Aceh, 2010-2021	24
3.3	Persentase Penduduk Aceh Menurut Tempat/Cara Berobat Jalan, 2021	25
3.4	Beberapa Indikator Sanitasi dan Rumah Sehat Provinsi Aceh, 2020-2021	26
3.5	Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis di Provinsi Aceh, 2010-2021	27
3.6	Tren Kemiskinan Provinsi Aceh, 2010-2021 (Maret)	28
3.7	Tren Gini Rasio Provinsi Aceh, 2010-2021	29
3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh, 2010-2021	30
4.1	Disparitas Pembangunan Manusia antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2021 ..	33
4.2	Disparitas Umur Harapan Hidup antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2021	34
4.3	Disparitas Harapan Lama Sekolah antarKabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2021 ...	35
4.4	Disparitas Rata-Rata Lama Sekolah antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2021 .	36
4.5	Disparitas Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2021	37
4.6	Disparitas Pertumbuhan IPM antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2021 ..	37

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Hal
1	Umur Harapan Hidup Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021.....	43
2	Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021	44
3	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021	45
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021.....	46
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021.....	47

Halaman ini sengaja dikosongkan



1

PENDAHULUAN

Organisasi internasional yang menangani pembangunan manusia di PBB yaitu *UNDP* (*United Nation Development Programme*) mendeklarasikan bahwa pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang memposisikan manusia bukan sebagai alat pembangunan, tapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

PENDAHULUAN

Ide dasar pembangunan manusia adalah untuk memenuhi tujuan utama pemerintah Indonesia dalam mencapai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Perwujudan gagasan pembangunan manusia adalah dengan memfokuskan perhatian pembangunan nasional Indonesia pada manusia sebagai titik sentral yang bercorak dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tidak dapat dipungkiri, rakyat harus diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan. Artinya, rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk memenuhi hal tersebut, yaitu untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tentunya dibutuhkan masyarakat Indonesia yang unggul dari segi kuantitas serta maju dari segi kualitas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah tersebut merupakan prasyarat penting untuk mencapai masyarakat Indonesia yang berkualitas.

Di era sebelum 1970-an, tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun per kapita, menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Kenyataannya, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai oleh negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) namun taraf hidup penduduknya tidak ikut meningkat. Oleh karena itu, para pakar merumuskan konsep baru dalam mengukur pembangunan suatu negara yang berorientasi pada manusia. Konsep ini mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pula kualitas manusianya. Inilah tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, diperlukan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas manusia sebagai bangsa Indonesia yang bersaing di era globalisasi. Regulasi pembangunan yang memegang teguh prinsip dan konsep pembangunan manusia mutlak diperlukan dimana manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir pembangunan. Cara pandang yang lebih luas ini memungkinkan pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga negara serta dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap dalam jangka panjang.

Pendahuluan

Sejak tahun 1990, angka IPM menjadi salah satu indikator yang mencerminkan progres kemajuan suatu bangsa, seperti yang dinyatakan dalam laporan yang dirilis oleh UNDP. Dalam laporan tersebut, tercakup 187 negara yang sudah terukur capaian IPM beserta semua komponen pembentuknya. Secara internasional, terdapat pembagian kelompok negara-negara berdasarkan nilai IPM, yaitu sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah.

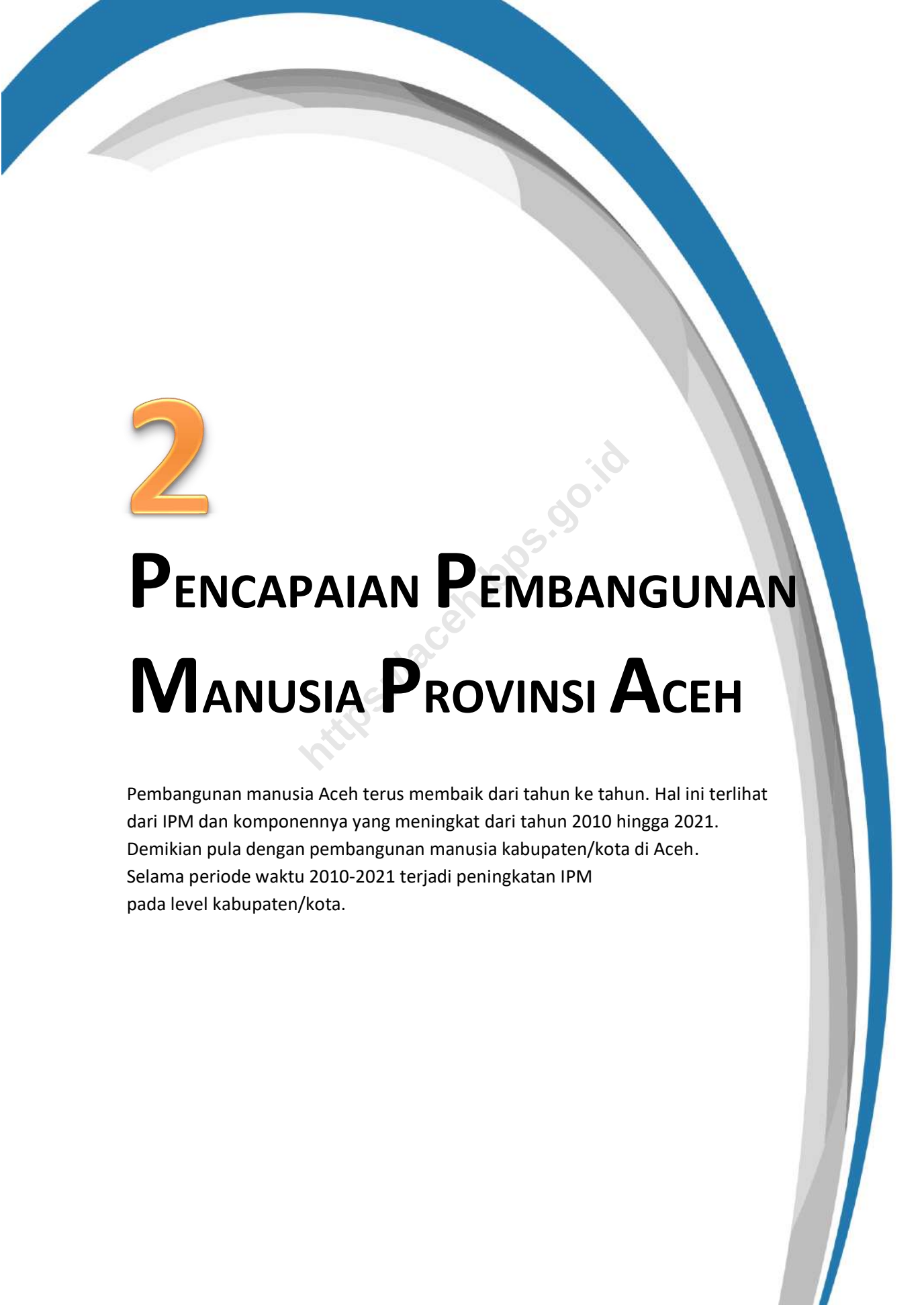
Perspektif baru yang dibangun oleh dunia internasional adalah kaitan pembangunan manusia dengan aspek kerentanan. Masyarakat dengan pembangunan manusia yang lebih tinggi terutama dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik lebih tahan banting dibandingkan dengan mereka yang kekurangan gizi dan rendah pendidikannya. Sehingga masyarakat yang rentan ini akan menghadapi kesulitan dalam mengubah nasibnya ketika terjadi guncangan maupun bencana. Pendekatan berbasis resiko akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan dalam hal pengelolaan resiko. Sama pentingnya dengan pendekatan pembangunan manusia yang membentuk kekuatan individu maupun masyarakat dalam upaya mengurangi kerentanan dan membangun ketahanan secara sosial maupun ekonomi.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Untuk itu, dalam rangka melihat kemajuan pembangunan, publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan komponen IPM pada tahun 2010-2021. Data IPM secara lengkap pada tahun 2010-2021 dapat dilihat pada tabel lampiran. Pada publikasi ini akan dianalisis mengenai capaian IPM Provinsi Aceh dan disparitasnya pada level kabupaten/kota.

Secara khusus, publikasi ini menyajikan:

- 1) Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Aceh;
- 2) Analisis peningkatan kapabilitas dasar pembangunan manusia di Provinsi Aceh;
- 3) Analisis disparitas capaian IPM dan komponennya level kabupaten/kota;
- 4) Analisis disparitas IPM antarkabupaten/kota.



2

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH

Pembangunan manusia Aceh terus membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari IPM dan komponennya yang meningkat dari tahun 2010 hingga 2021. Demikian pula dengan pembangunan manusia kabupaten/kota di Aceh. Selama periode waktu 2010-2021 terjadi peningkatan IPM pada level kabupaten/kota.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

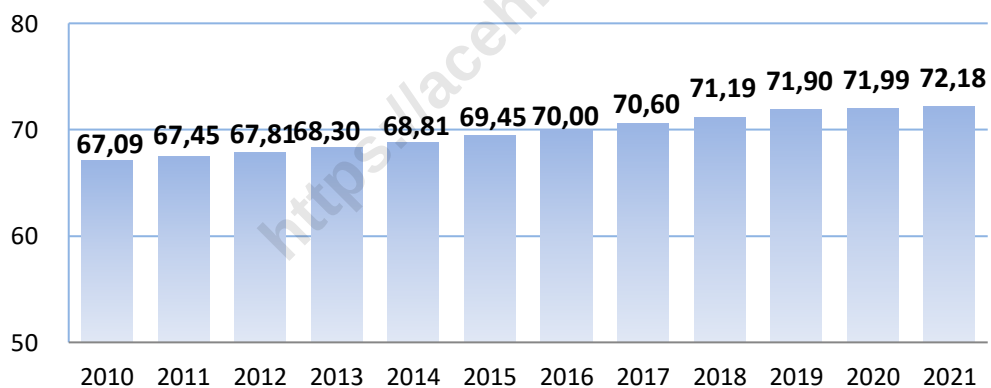
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI ACEH

2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Provinsi Aceh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami perbaikan, terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2010 hingga 2021 (lihat Gambar 2.1). IPM Aceh mengalami kenaikan sebesar 5,09 poin periode 2010 hingga 2021. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Aceh semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh, 2010-2021



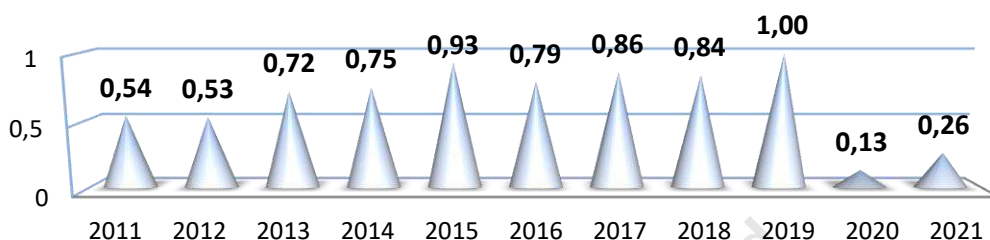
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembagian kategori IPM untuk membedakan capaian antarwilayah dikelompokkan menjadi: kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2010, IPM Aceh berada pada kategori sedang, sedangkan mulai pada tahun 2016 hingga 2021, IPM sudah berada pada kategori tinggi.

Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai gambaran perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Hal ini adalah indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode waktu. Pertumbuhan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya

diukur dari tingginya capaian angka IPM pada satu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka semakin cepat nilai IPM yang ideal akan tercapai.

Gambar 2.2 Pertumbuhan IPM Provinsi Aceh, 2011-2021 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.2 menampilkan pertumbuhan IPM Aceh tiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2011 – 2021, pertumbuhan IPM memperlihatkan pergerakan yang cukup baik. Tahun 2011, IPM Aceh tumbuh 0,54 persen dibandingkan IPM tahun 2010. Angka yang sama ditunjukkan kembali pada pertumbuhan IPM 2012 terhadap capaian IPM Aceh tahun 2011, yaitu 0,53 persen. Kondisi terkini, IPM Aceh tahun 2021 naik sebesar 0,26 persen dibandingkan tahun 2020. Secara umum, rata-rata pertumbuhan IPM Aceh tiap tahun dari 2011 – 2021 adalah sebesar 0,67 persen.

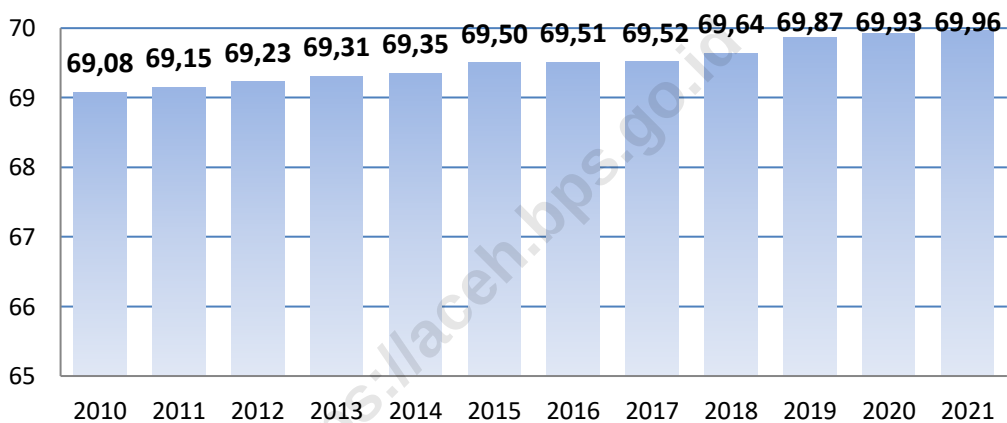
Dalam metode perhitungan IPM, tiga komponen utama dalam pengukuran capaian pembangunan manusia, sesuai dengan rekomendasi *UNDP*, adalah dimensi umur dan kesehatan (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita). Dengan menggunakan rata-rata geometrik, ketiga dimensi membentuk IPM dengan keseimbangan peningkatan di masing-masing dimensi.

Dimensi yang pertama, Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator yang menggambarkan aspek kesehatan, yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator UHH, semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah tertentu untuk hidup lebih lama.

Di Provinsi Aceh, indikator ini menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2010 – 2021. UHH Aceh tahun 2010 sebesar 69,08 tahun, artinya bayi yang lahir di

Aceh pada tahun 2010 akan bertahan hidup hingga usia 69 tahun 1 bulan. Dengan terjadinya kenaikan UHH tiap tahun, pada tahun 2021 UHH Aceh telah mencapai 69,96 tahun, atau bayi yang lahir di Aceh tahun 2021 berpeluang hidup hingga usia 69 tahun 11 bulan. Hal ini menandakan bahwa adanya kondisi yang semakin membaik dalam hal derajat kesehatan masyarakat di Aceh karena UHH merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup masyarakat di Provinsi Aceh memang menunjukkan peningkatan, namun capaian tersebut masih di bawah angka nasional yang pada tahun 2021 mencapai 71,57 tahun.

Gambar 2.3 Umur Harapan Hidup Provinsi Aceh, 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

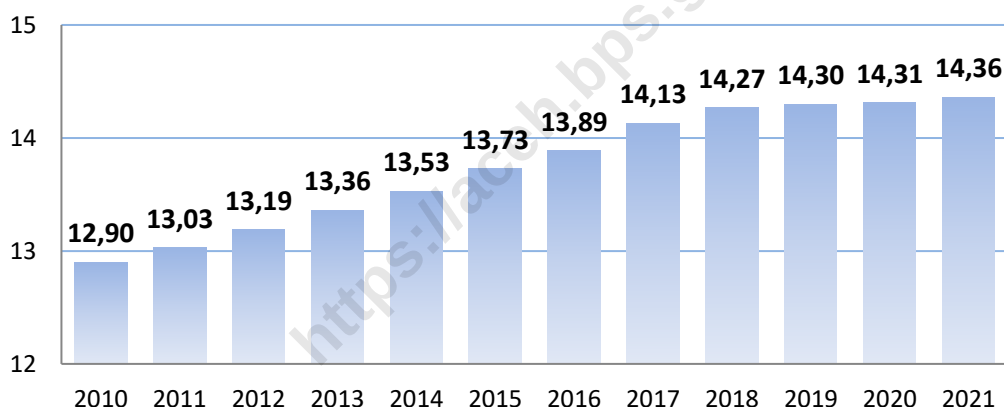
Dalam kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, memiliki sumber daya manusia yang sehat adalah investasi yang vital. Perwujudan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan sampai ke tingkat terkecil dan daerah terpencil dicapai dengan adanya jaminan kecukupan jumlah tenaga kesehatan berbanding dengan jumlah penduduk yang perlu penanganan kesehatan. Pemerintah wajib proaktif menyerukan budaya dan kebiasaan hidup sehat agar peningkatan kualitas manusia dari dimensi ini tidak hanya sekedar angka dalam indikator, namun terwujudkan secara riil di kehidupan masyarakat Aceh.

Dimensi kedua yang menjadi pembentuk indeks pembangunan manusia adalah aspek pendidikan. Pada penghitungan IPM metode, aspek ini dibentuk oleh agregat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah dihitung dari jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang bersekolah sampai dengan jenjang tertentu menurut kelompok umur yang disesuaikan dengan

program wajib belajar 9 tahun. Indikator ini, tidak mencakup anak yang mulai sekolah pada usia 5 tahun.

Harapan lama sekolah Aceh pada tahun 2010 adalah 12,90 tahun. Maknanya adalah seorang yang berusia 7 tahun pada tahun 2010 mempunyai peluang untuk bersekolah selama 12,90 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun pertama (dengan asumsi lama sekolah 12 tahun telah menamatkan sekolah menengah atas). Capaian HLS Aceh hingga tahun 2021 terus meningkat dan mencapai angka 14,36 tahun. Ketika angka ini terpenuhi, harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas di Provinsi Aceh pada tahun 2021 berada pada tahun ketiga di jenjang perguruan tinggi. Faktanya, HLS Aceh tahun 2021 lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional untuk indikator Harapan Lama Sekolah (HLS nasional tahun 2021 sebesar 13,08 tahun).

Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2021



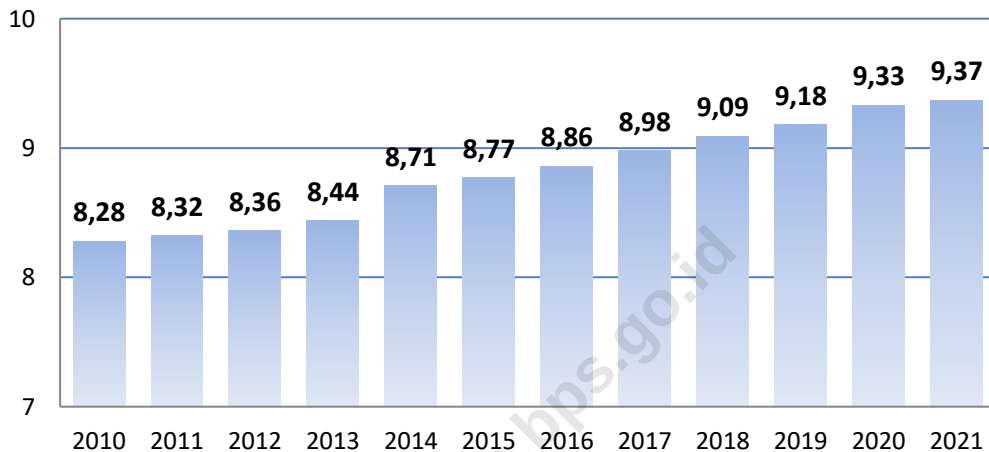
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain HLS, komponen pendidikan lainnya yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (dengan asumsi pada saat berusia 25 tahun proses pendidikan seseorang sudah berakhir). Indikator ini merupakan penghitungan dari kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang pernah dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Sama seperti HLS, RLS dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti ditampilkan pada Gambar 2.5, pada tahun 2010 penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata bersekolah sampai dengan kelas 3 SMP (belum tamat) atau telah mengenyam pendidikan selama 8,28 tahun. Angka ini terus meningkat hingga ke

tahun 2021 yang mencapai 9,37. Artinya, hingga tahun 2021 secara rata-rata penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata bersekolahnya sampai dengan kelas 1 SMA, atau telah mengenyam pendidikan selama 9,37 tahun.

Gambar 2.5 Rata rata Lama Sekolah Provinsi Aceh, 2010-2021



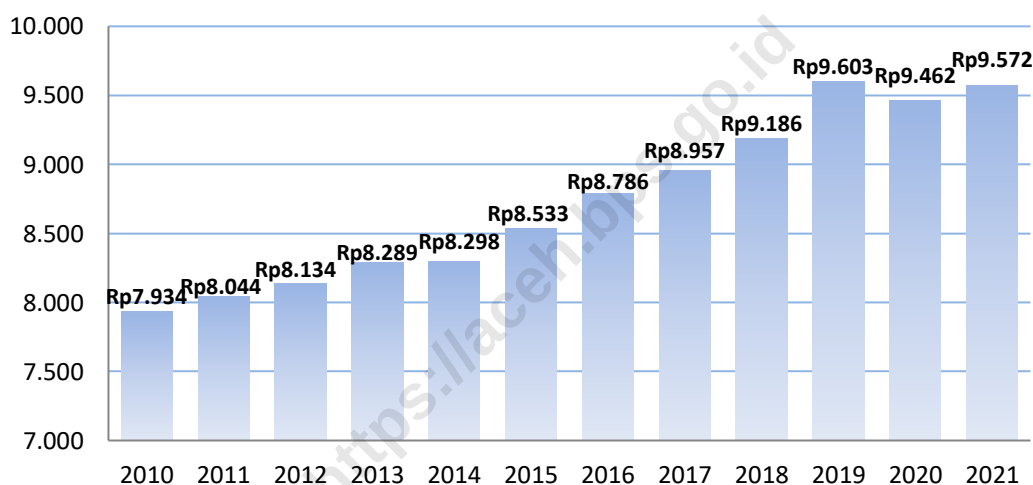
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dibandingkan dengan angka RLS nasional, capaian Provinsi Aceh pada komponen IPM tahun 2021 lebih tinggi dari rata-rata 34 provinsi. RLS nasional tahun 2021 tercatat sebesar 8,54 tahun, artinya secara nasional masih belum memenuhi atau kurang dari 9 tahun sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam program wajib belajar. Sedangkan di Aceh, RLS sudah mencapai angka 9,37 tahun, namun sarana pendukung dunia pendidikan seperti jumlah sekolah maupun tenaga pendidik secara kuantitas maupun kualitas masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Aspek terakhir yang membentuk IPM adalah salah satu indikator yang menggambarkan kualitas hidup manusia dari standar hidup layak. Indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity – PPP*) menunjukkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk konsumsi barang maupun jasa. Perubahan kondisi perekonomian akan secara nyata ikut merubah pola konsumsi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen ini cukup sensitif.

Indikator *PPP* dalam IPM mencakup 96 komoditas, terdiri dari 60 komoditas makanan dan 36 komoditas nonmakanan. Cakupan ini lebih luas dari sebelumnya pada penghitungan cara lama yang hanya mencakup total 27 komoditas dalam menghitung paritas daya beli konsumen. Sumber data utama dari komponen ini adalah hasil

pencacahan Susenas yang menghasilkan rata-rata pengeluaran per kapita selama setahun, dari level provinsi hingga kabupaten/kota. Selama periode 2010-2019, pengeluaran per kapita penduduk Aceh setiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali pada Tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak dari covid-19. Pada Tahun 2019, pengeluaran per kapita Aceh tercatat sebesar 9,603 juta rupiah, sementara tahun 2020 sedikit menurun menjadi 9,492 juta rupiah karena pengaruh covid-19, namun pada taun 2021 mengalami peningkatan. Gambar 2.6 menampilkan perubahan komponen pengeluaran per kapita per tahun masyarakat Aceh selama tahun 2010-2021.



Gambar 2.6 Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Provinsi Aceh, 2010-2021 (ribu)

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota

Dua puluh tiga kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Aceh memiliki keberagaman baik dari segi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan capaian pembangunan manusia berbeda pada setiap daerah. Faktor-faktor penentu keberhasilan capaian pembangunan ditentukan dari program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di samping sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia.

Secara umum, kualitas manusia di masing-masing kabupaten/kota di Aceh yang diukur melalui IPM terlihat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan agregat IPM Aceh. Daerah-daerah dengan IPM yang relatif tinggi

mampu mempertahankan prestasinya (meskipun ada yang naik-turun peringkatnya), sementara daerah yang masih lebih rendah semakin terpacu untuk meningkatkan kapabilitas manusia di masing-masing komponen pembentuknya.

Tabel 2.1 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2011-2021

Propinsi/Kabupaten/ Kota	IPM										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	67,45	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18
01. Simeulue	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82	64,41	64,74	65,70	66,03	66,41
02. Aceh Singkil	63,13	64,23	64,87	65,27	66,05	66,96	67,37	68,02	68,91	68,94	69,22
03. Aceh Selatan	61,52	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13	65,03	65,92	66,90	67,12	67,44
04. Aceh Tenggara	64,27	64,99	65,55	65,90	66,77	67,48	68,09	68,67	69,36	69,37	69,44
05. Aceh Timur	62,35	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42	66,32	66,82	67,39	67,63	67,83
06. Aceh Tengah	70,00	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04	72,19	72,64	73,14	73,24	73,37
07. Aceh Barat	66,47	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26	70,20	70,47	71,22	71,38	71,67
08. Aceh Besar	69,94	70,10	70,61	71,06	71,70	71,75	72,00	72,73	73,55	73,56	73,58
09. Pidie	66,95	67,30	67,59	67,87	68,68	69,06	69,52	69,93	70,41	70,63	70,70
10. Bireuen	67,03	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21	71,11	71,37	72,27	72,28	72,33
11. Aceh Utara	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19	67,67	68,36	69,22	69,33	69,46
12. Aceh Barat Daya	61,75	62,15	62,62	63,08	63,77	64,57	65,09	65,67	66,56	66,75	66,99
13. Gayo Lues	61,91	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26	65,01	65,88	66,87	67,22	67,56
14. Aceh Tamiang	64,89	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41	67,99	68,45	69,23	69,24	69,48
15. Nagan Raya	64,24	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32	67,78	68,15	69,11	69,18	69,31
16. Aceh Jaya	65,17	66,42	66,92	67,30	67,53	67,70	68,07	68,83	69,74	69,75	69,84
17. Bener Meriah	68,24	69,14	69,74	70,00	70,62	71,42	71,89	72,14	72,97	72,98	73,27
18. Pidie Jaya	68,69	68,90	69,26	69,89	70,49	71,13	71,73	72,12	72,87	73,20	73,60
71. Banda Aceh	80,87	81,30	81,84	82,22	83,25	83,73	83,95	84,37	85,07	85,41	85,71
72. Sabang	70,15	70,84	71,07	71,50	72,51	73,36	74,10	74,82	75,77	75,78	76,11
73. Langsa	72,15	72,75	73,40	73,81	74,74	75,41	75,89	76,34	77,16	77,17	77,44
74. Lhokseumawe	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78	76,34	76,62	77,30	77,31	77,57
75. Subulussalam	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18	62,88	63,48	64,46	64,93	65,27

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi, selama tahun 2011-2021 selalu menempati posisi pertama dalam peringkat IPM di Provinsi Aceh. Hal ini karena ketersediaan berbagai fasilitas dan sarana kesehatan, pendidikan, dan perekonomian

yang lebih memadai di Kota Banda Aceh. Potensi inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Banda Aceh telah masuk dalam kategori IPM sangat tinggi ($IPM \geq 80$) sejak tahun 2010 hingga tahun 2021. Jika dilihat lebih rinci, komponen IPM Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai peringkat tertinggi adalah harapan lama sekolah mencapai 17,80 tahun, rata-rata mencicipi pendidikan melalui sekolah selama 12,83 tahun (semester 2 pada jenjang pendidikan perguruan tinggi) dan pengeluaran per kapita per tahun penduduknya mencapai 16,891 juta rupiah.

Di bawah peringkat Kota Banda Aceh adalah Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa. Dua daerah ini sejak tahun 2011-2021 bertahan menduduki peringkat 2 dan 3 dalam capaian IPM. Unsur-unsur penunjang dalam berbagai aktivitas sosial ekonomi yang telah dibangun di kedua kota ini seperti bangunan sekolah, rumah sakit dan sektor penunjang perekonomian masyarakat seperti perdagangan dan jasa-jasa lainnya telah berkembang dengan pesat. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya yang termasuk ke dalam peringkat 10 besar IPM pada tahun 2021 adalah: Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Barat.

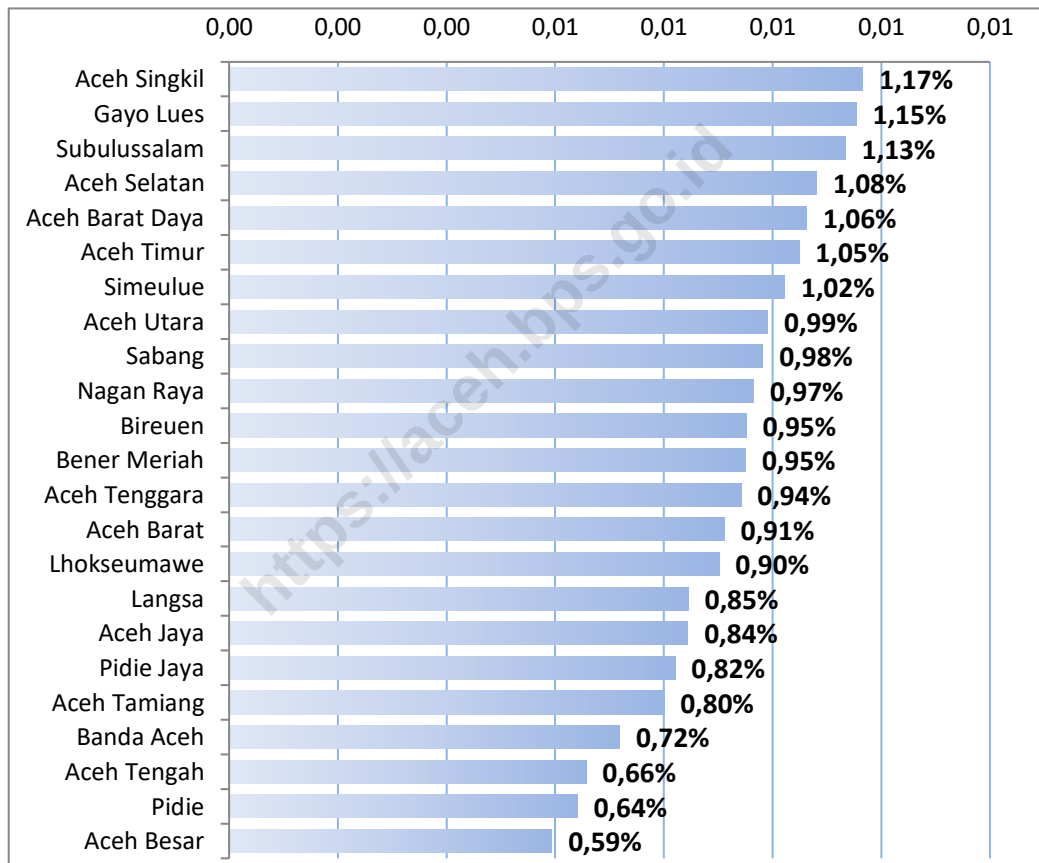
Di peringkat menengah ke bawah, yaitu dari 11 sampai dengan 15, pada tahun 2021 ditempati oleh Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Di kelima daerah tersebut, pembangunan manusianya tercermin dari Umur Harapan Hidup yang berkisar antara 66,95 tahun hingga 69,63 tahun. Dari segi pendidikan, kelima daerah dengan IPM menengah ini tercatat harapan lama sekolahnya sekitar 13,76 hingga 14,71 tahun dan rata-rata lama bersekolahnya sekitar 8,64 sampai 9,67 tahun (kelas 3 SMP – kelas 1 SMA). Sementara besaran pengeluaran per kapita per tahun di kelima kabupaten ini adalah sekitar 8,030 – 9,860 juta rupiah.

Daerah-daerah yang peringkat pembangunan manusianya relatif rendah adalah kabupaten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue, dan Kota Subulussalam. Kelima daerah ini menempati peringkat 19 hingga 23 pada Tahun 2020. Pada tahun tersebut, capaian UHH penduduk di wilayah tersebut berkisar antara 64,02 – 65,47 tahun, HLS penduduk usia di atas 7 tahun berkisar 13,76 – 14,61 tahun, dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara 7,84 – 9,34 tahun (kelas 2 sampai kelas 1 SMA), dan pengeluaran per kapita disesuaikan berkisar antara 7,085 – 8,791 juta rupiah.

Perubahan peringkat IPM yang terjadi bergantung pada pembangunan unsur-unsur penunjang IPM di masing-masing kabupaten/kota, tentu saja memiliki berbagai tingkat perubahan pembangunan yang berbeda-beda. Pemekaran wilayah beberapa

kabupaten/kota pada periode 2010-2021 juga menjadi salah satu faktor perbedaan kemajuan pembangunan antara kabupaten baru dengan kabupaten induknya. Secara umum, pembangunan fasilitas yang biasanya lebih dahulu terjadi di perkotaan, sehingga pelayanan di pelosok kabupaten menjadi lebih kurang. Beberapa kabupaten berhasil mempertahankan peringkatnya secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan beberapa kabupaten induk tetap mempertahankan beberapa fasilitas yang dimiliki, seperti gedung perkantoran, sekolah, dan sarana kesehatan.

Gambar 2.7 Rata-Rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota, 2010-2021 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Capaian IPM yang menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah yaitu berdasarkan kecepatan pergerakan IPM menuju nilai ideal yang ditampilkan melalui pertumbuhan IPM dari tahun ke tahun. Seperti pada Gambar 2.7, pada periode 2010 – 2021 pertumbuhan IPM kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa kecepatan peningkatan IPM per tahun berkisar antara 0,59 persen hingga 1,17 persen. Kabupaten Aceh Singkil selama rentang waktu tersebut

berhasil mencatatkan rata-rata pertumbuhan IPM paling tinggi yaitu 1,17 persen dan Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang paling rendah yaitu 0,59 persen.

Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status Pencapaian IPM, 2017, 2019, 2021

Kategori		2017	2019	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
Sangat Tinggi	(IPM $\geq$ 80)	1	1	1
Tinggi	(70 $\leq$ IPM < 80)	9	10	10
Sedang	(60 $\leq$ IPM < 70)	13	12	12
Rendah	(IPM < 60)	0	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain melihat dari pertumbuhan IPM, pencapaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dengan menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah meningkat status pencapaiannya dari kategori rendah ke kategori yang lebih tinggi pada periode tertentu. Pada tahun 2021, tidak terdapat lagi kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori IPM rendah (di bawah indeks 60), Kota Banda Aceh menjadi satu-satunya daerah yang status IPM-nya sangat tinggi di Provinsi Aceh. Pada tahun 2021 terdapat 10 kabupaten/kota berstatus IPM tinggi (indeks antara 70-79) dan 12 daerah masih berstatus IPM sedang (indeks antara 60-69).

Letak kewilayahan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Timur - Utara, Barat-Selatan, dan Tengah - Pedalaman. Letak geografis ini secara tidak langsung juga tercermin dalam pengelompokkan capaian peringkat IPM tertinggi dan terendah. Untuk kabupaten/kota yang terletak di wilayah Timur - Utara, sebanyak lima kabupaten/kota menempati urutan peringkat lima teratas IPM selama periode 2010-2021, sementara dari wilayah tengah-pedalaman hanya satu kabupaten yang berhasil mencapai posisi ini, yaitu kabupaten Aceh Tengah menempati peringkat enam. Sementara, enam kabupaten/kota pada periode 2010-2020 berbagi tempat di peringkat teratas dalam hal capaian pembangunan manusianya adalah Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.3 Enam Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2011-2021

Kabupaten/ Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)
Banda Aceh	80,87 (1)	81,30 (1)	81,84 (1)	82,22 (1)	83,25 (1)	83,73 (1)	83,95 (1)	84,37 (1)	85,07 (1)	85,41 (1)	85,71 (1)
Lhokseumawe	72,35 (2)	73,55 (2)	74,13 (2)	74,44 (2)	75,11 (2)	75,78 (2)	76,34 (2)	76,62 (2)	77,30 (2)	77,31 (2)	77,57 (2)
Langsa	72,15 (3)	72,75 (3)	73,40 (3)	73,81 (3)	74,74 (3)	75,41 (3)	75,89 (3)	76,34 (3)	77,16 (3)	77,17 (3)	77,44 (3)
Sabang	70,15 (4)	70,84 (4)	71,07 (4)	71,50 (4)	72,51 (4)	73,36 (4)	74,10 (4)	74,82 (4)	75,77 (4)	75,78 (4)	76,11 (4)
Aceh Besar	69,94 (6)	70,10 (6)	70,61 (5)	71,06 (5)	71,70 (5)	71,75 (6)	72,00 (6)	72,73 (5)	73,55 (5)	73,56 (5)	73,58 (6)
Aceh Tengah	70,00 (5)	70,18 (5)	70,51 (6)	70,96 (6)	71,51 (6)	72,04 (5)	72,19 (5)	72,64 (6)	73,14 (6)	73,24 (6)	73,37 (7)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Seperti telah disebutkan, Kota Banda Aceh menempati peringkat pertama capaian IPM selama tahun 2011 – 2021. Sementara itu, Kota Lhokseumawe Kota Langsa, dan Sabang menempati posisi 2,3, dan 4 sampai dengan tahun 2020. Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Tengah selama tahun 2011-2021 terjadi beberapa kali perubahan peringkat IPM nya di antara peringkat lima hingga peringkat enam, dan tujuh.

Pada kelompok peringkat IPM terendah, enam kabupaten yang menempati posisi ini sejak tahun 2011 hingga 2021. Kabupaten Aceh Timur secara konsisten menempati urutan IPM ke-18 selama periode tersebut. Sementara Kabupaten Gayo Lues, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya berada pada urutan masing-masing ke-19, 20, dan ke-21 pada tahun 2021. Kota Subulussalam merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil adalah terendah nilai IPM-nya dan menempati posisi paling bawah peringkat IPM sejak tahun 2011-2021. Kesimpulannya adalah tiga kabupaten/kota yang menempati posisi terbawah yang ditampilkan pada Tabel 2.5 merupakan daerah hasil pemekaran wilayah, sehingga pembangunan belum terdongkrak dengan program-program pembangunan dari pemerintah setempat.

Tabel 2.4 Enam Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2011-2021

Kabupaten/ Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh Timur	62,35 (18)	62,93 (18)	63,27 (18)	63,57 (18)	64,55 (18)	65,42 (18)	66,32 (18)	66,82 (18)	67,39 (18)	67,63 (18)	67,83 (18)
Gayo Lues	61,91 (19)	62,85 (19)	63,22 (19)	63,34 (19)	63,67 (20)	64,26 (20)	65,01 (21)	65,88 (20)	66,87 (20)	67,22 (19)	67,56 (19)
Aceh Selatan	61,52 (21)	61,69 (21)	62,27 (21)	62,35 (21)	63,28 (21)	64,13 (21)	65,03 (20)	65,92 (19)	66,90 (19)	67,12 (20)	67,44 (20)
Aceh Barat Daya	61,75 (20)	62,15 (20)	62,62 (20)	63,08 (20)	63,77 (19)	64,57 (19)	65,09 (19)	65,67 (21)	66,56 (21)	66,75 (21)	66,99 (21)
Simeulue	61,03 (22)	61,25 (22)	61,68 (22)	62,18 (22)	63,16 (22)	63,82 (22)	64,41 (22)	64,74 (22)	65,70 (22)	66,03 (22)	66,41 (22)
Subulussalam	59,34 (23)	59,76 (23)	60,11 (23)	60,39 (23)	61,32 (23)	62,18 (23)	62,88 (23)	63,48 (23)	64,46 (23)	64,93 (23)	65,27 (23)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum dapat dinyatakan bahwa, pada periode 2011-2021, pencapaian pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih relatif bervariasi terlihat dari persebarannya dalam pengelompokan status IPM. Upaya pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pembangunan manusia di wilayahnya masing-masing masih harus ditingkatkan meskipun telah menampakkan hasil yang baik. Capaian yang baik adalah tidak ada lagi kabupaten/kota yang berstatus IPM rendah sejak tahun 2013 dan capaian terbaiknya adalah sudah ada satu kota yang sejak tahun 2010-2021 mewakili Aceh untuk masuk ke IPM berstatus sangat tinggi, yaitu Kota Banda Aceh.

3

PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA

Fokus peningkatan pembangunan manusia tidak hanya pada komponen penyusun IPM saja, melainkan juga pada indikator-indikator lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi peningkatan komponen IPM. Perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh karena dua aspek tersebut sebagai modal dasar dalam membentuk manusia yang berkualitas

Halaman ini sengaja dikosongkan

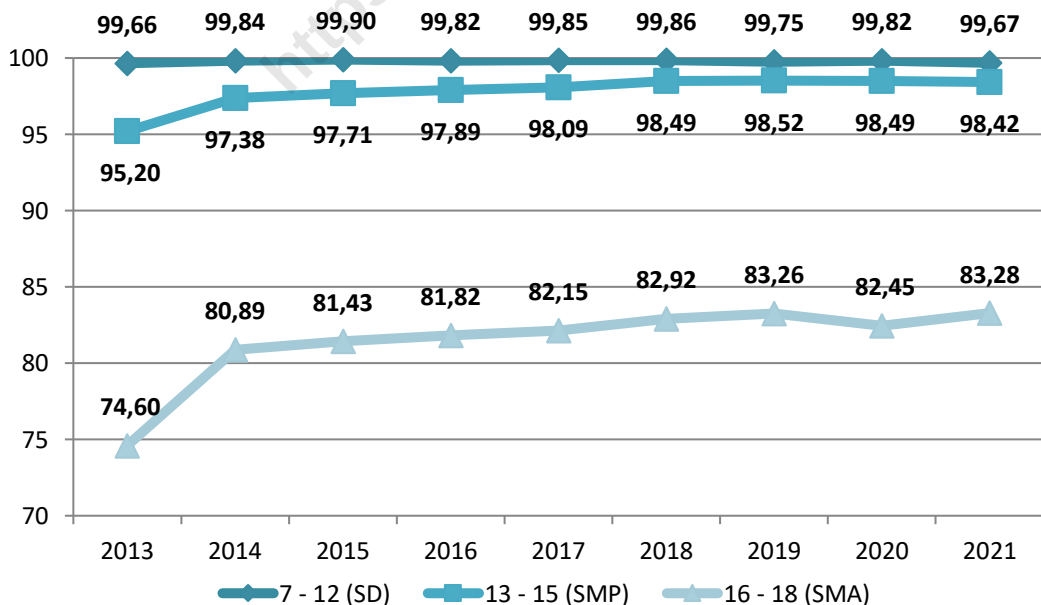
PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA

Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Cakupan pendidikan formal idealnya mengalami perluasan, sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh. Di antaranya adalah program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh, 2013-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Secara umum APS Provinsi Aceh mengalami peningkatan pada periode 2013 hingga 2021. Gambar 3.1 menunjukkan capaian APS pada setiap kelompok umur sekolah di mana capaian APS 7-12 tahun atau usia sekolah dasar merupakan APS yang tertinggi.

Sejak tahun 2015 sampai 2021, APS untuk kelompok 7-12 tahun berturut-turut mencapai 99,90 persen, 99,82 persen, 99,85 persen, 99,86 persen, 99,75 persen, 99,82 persen, dan 99,67. Namun demikian, perlu dicermati bahwa belum semua penduduk di Aceh mengecap pendidikan formal sampai lulus sekolah dasar.

Lebih lanjut, APS 13-15 tahun atau usia sekolah menengah pertama, pada periode 2013 - 2019 mengalami peningkatan, kecuali Tahun 2020 dan 2021 sedikit mengalami penurunan, meskipun capaiannya lebih rendah dari APS 7-12 tahun. Tercatat hanya 98,42 persen penduduk di Aceh pada 2021 yang berpartisipasi dalam sekolah untuk kelompok umur ini, menurun tipis dari 98,49 persen pada tahun 2020. Capaian ini juga harus menjadi perhatian pemerintah bahwa masih terdapat sekitar 1,5 persen penduduknya yang belum mengecap pendidikan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk usia sekolah 16-18 tahun, tingkat APS tahun 2021 hanya mencapai 83,28 persen. Hal ini bermakna bahwa masih terdapat 16,72 persen penduduk Aceh tidak menamatkan pendidikan sekolah menengah atas.

Tabel 3.1 Disparitas Angka Partisipasi Sekolah Antarkabupaten, 2019-2021

Kelompok Umur	Tahun	Maksimum	Minimum	5 Kab/Kota dengan APS Terendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12 Tahun	2019	Bireuen, Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe (mendekati 100%)	Aceh Barat Daya (99,52 %)	Aceh Barat Daya, Simeulue, Bener Meriah, Aceh Timur
	2020	Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Lhokseumawe (99,99%)	Aceh Jaya (99,46 %)	Simeulue, Aceh Jaya, Banda Aceh, Aceh Singkil, Aceh Selatan
	2021	Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Singkil (99,97-99,99%)	Aceh Tamiang (99,35 %)	Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya

13-15 Tahun	2019	Banda Aceh (100%)	Aceh Jaya (96,47%)	Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah
	2020	Banda Aceh (99,89%)	Aceh Barat Daya (96,77%)	Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah
	2021	Langsa (99,67%)	Aceh Jaya (96,98%)	Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah
16-18 Tahun	2019	Sabang (98,86%)	Aceh Timur (73,96%)	Aceh Timur, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Utara
	2020	Sabang (96,17%)	Aceh Timur (73,28%)	Aceh Timur, Aceh Barat, Bireuen, Nagan raya, Aceh Jaya
	2021	Sabang (97,88%)	Aceh Timur (73,83%)	Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tamiang

Sumber: Badan Pusat Statistik

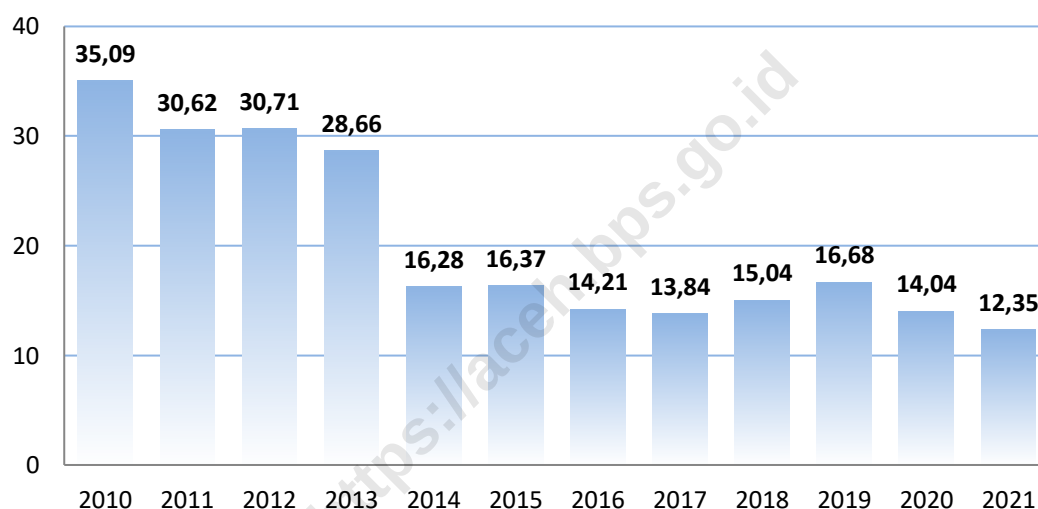
Disparitas capaian APS yang terjadi pada level kabupaten/kota memiliki persentase yang beragam dari tahun ke tahun menurut kelompok umur. Pada tahun 2021, kabupaten Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Singkil mencatat angka APS tertinggi dan kabupaten Aceh Tamiang terendah untuk kelompok umur 7-12 tahun, dengan disparitas sebesar 0,64 poin. Sementara untuk usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun), Kota Langsa memiliki APS tertinggi di tahun 2021, yaitu 99,67 persen. Capaian ini berselisih sebesar 2,69 poin dari APS terendah yaitu APS Kabupaten Aceh Jaya yang sebesar 96,98 persen. Lebih lanjut, untuk APS 16-18 tahun, Kota Sabang merupakan daerah dengan capaian APS tertinggi dan Aceh Timur terendah di tahun 2021 dengan disparitas kedua kabupaten ini cukup besar yaitu 24,05 poin.

Salah satu hambatan peningkatan kapasitas dasar penduduk adalah tingginya biaya pendidikan. Ketidakmampuan untuk membiayai sekolah akan berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. Menyikapi hal ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah membebaskan biaya pendidikan, memberikan biaya bantuan yatim piatu, dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi. Namun, sepertinya manfaat dari program tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat, sehingga angka putus sekolah cukup tinggi pada kelompok umur 16-18 tahun di Provinsi Aceh.

3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas hidup manusia dari segi kesehatan. Selain pendidikan, derajat kesehatan menjadi salah satu pilar penentu kualitas hidup manusia. Sehingga pemerintah diharapkan memiliki tingkat kepedulian tinggi, serta peran dari seluruh masyarakat untuk mendukung dan menjaga berbagai fasilitas kesehatan agar peningkatan derajat kesehatan dapat tercapai.

Gambar 3.2 Angka Kesakitan Penduduk Aceh, 2010-2021



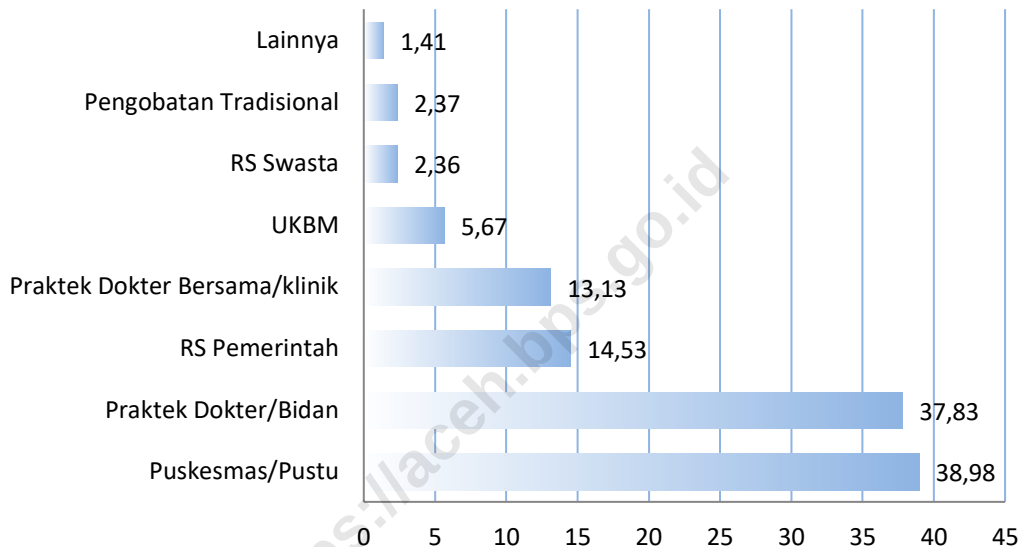
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dengan tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan, diharapkan status kesehatan yang optimal dapat menjadikan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur status kesehatan adalah angka morbiditas (angka kesakitan). Penduduk yang mengalami morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data Susenas tahun 2021, angka morbiditas (angka kesakitan) penduduk Aceh adalah sebesar 12,35 menurun dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 14,04 persen.

Dalam mengobati keluhan penyakit, masyarakat Aceh umumnya lebih memilih berobat jalan ke fasilitas kesehatan seperti praktek dokter/bidan dan puskesmas/pustu. Pada tahun 2021, persentase penduduk Aceh yang memanfaatkan fasilitas praktek dokter/bidan dan puskesmas/pustu masing-masing adalah sebanyak

37,83 dan 38,98 persen. Persebaran puskesmas/pustu di hampir semua kecamatan di Aceh semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga mempermudah akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Sementara persentase jumlah penduduk yang berobat jalan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta masing-masing hanya sebesar 14,53 persen dan 2,36 persen.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Aceh Menurut Tempat/Cara Berobat Jalan, 2021



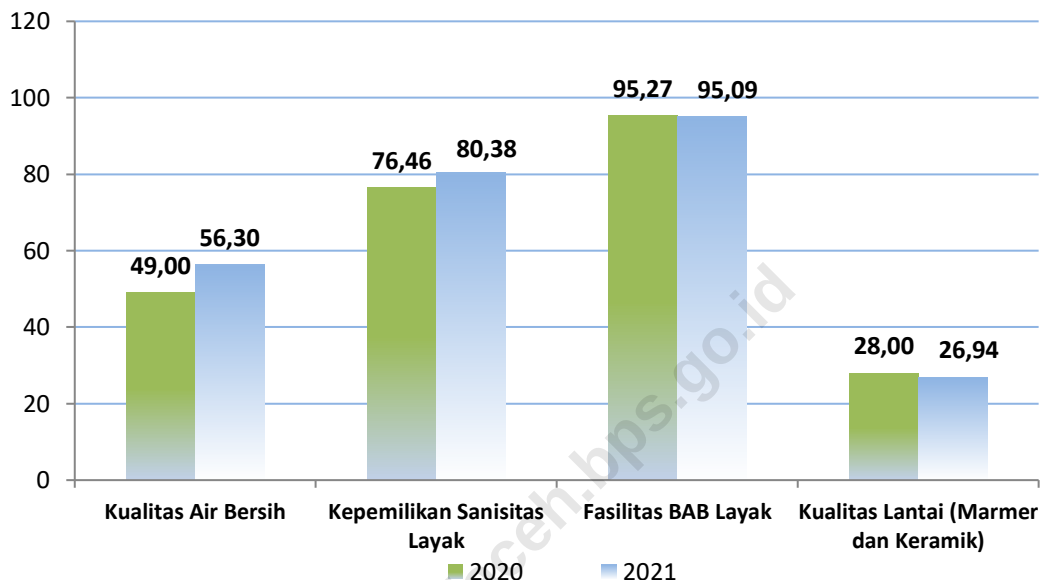
Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor-faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan kependudukan/keturunan. Berdasarkan konsep derajat kesehatan ini faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan. Tidak hanya itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan.

Kondisi fisik rumah dinilai sangat mempengaruhi kesehatan penduduk. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MenKes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa kelompok penilaian rumah sehat meliputi komponen rumah (dinding, lantai, langit-langit, dan ventilasi),

komponen sanitasi (air bersih, pembuangan kotoran, limbah, dan sampah) serta komponen perilaku penghuni rumah (membuka jendela, membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya).

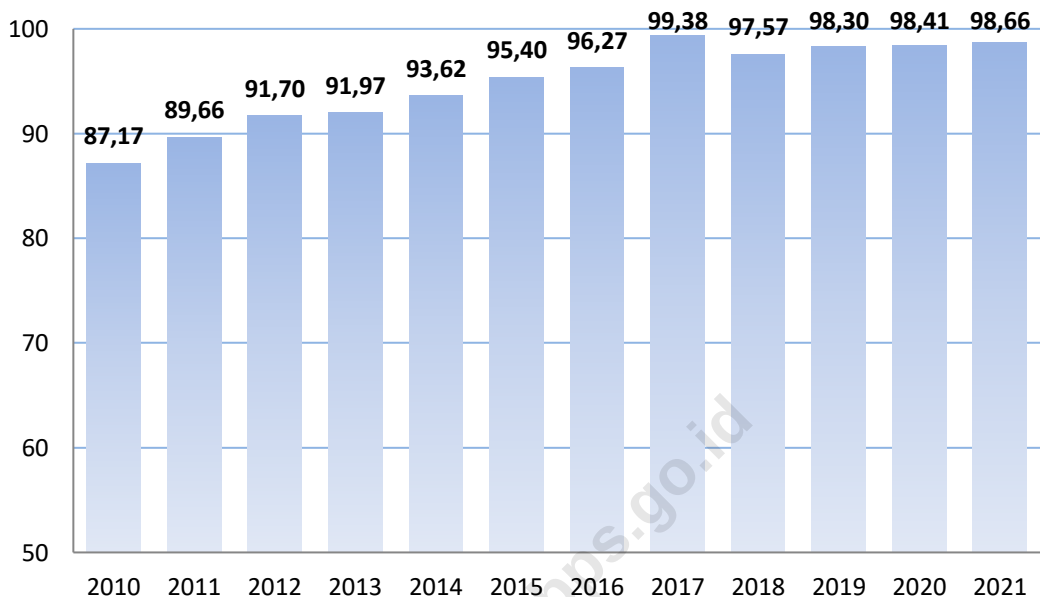
Gambar 3.4 Beberapa Indikator Sanitasi dan Rumah Sehat Provinsi Aceh, 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi rumah tangga di Aceh, seperti pada Gambar 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 83,99 persen rumah tangga yang sudah memiliki fasilitas buang air besar yang layak (milik sendiri dan bersama). Kondisi ini cukup meningkat dibandingkan tahun 2020 tercatat sebesar 83,82 persen. Sementara itu, jumlah rumah tangga dengan fasilitas BAB layak (kloset leher angsa dan tangki septik) sedikit menurun dari 95,27 persen pada Tahun 2020 menjadi 95,09 persen pada tahun 2021. Di sisi lain, sekitar 56,30 persen penduduk Aceh yang mengkonsumsi air bersih berupa air mineral (bermerek dan isi ulang) dan air ledeng (meteran dan eceran). Selanjutnya, menilik indikator kualitas lantai (menggunakan marmer dan keramik), tercatat sebanyak 26,94 persen rumah tangga di Aceh menggunakan bahan bangunan utama lantai rumah terluas menggunakan marmer dan keramik. Sebagian besar (61,64 persen) menggunakan semen sebagai bahan bangunan utama, sisanya dari papan/kayu 8,30 persen, tanah tercatat 3,11 persen, dan bambu 0,41 persen.

Gambar 3.5 Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis di Provinsi Aceh, 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator lainnya sebagai faktor pendukung upaya peningkatan pembangunan manusia melalui aspek kesehatan adalah pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Hal ini pelayanan kesehatan yang pertama kali bagi manusia sejak lahir ke dunia yaitu berawal dari proses persalinan. Tersedianya pelayanan kesehatan untuk persalinan dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya) adalah faktor penting untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Praktek persalinan yang aman sudah barang tentu menjadi incaran rumah tangga untuk menurunkan resiko-resiko medis hingga menekan angka kematian karena proses kelahiran.

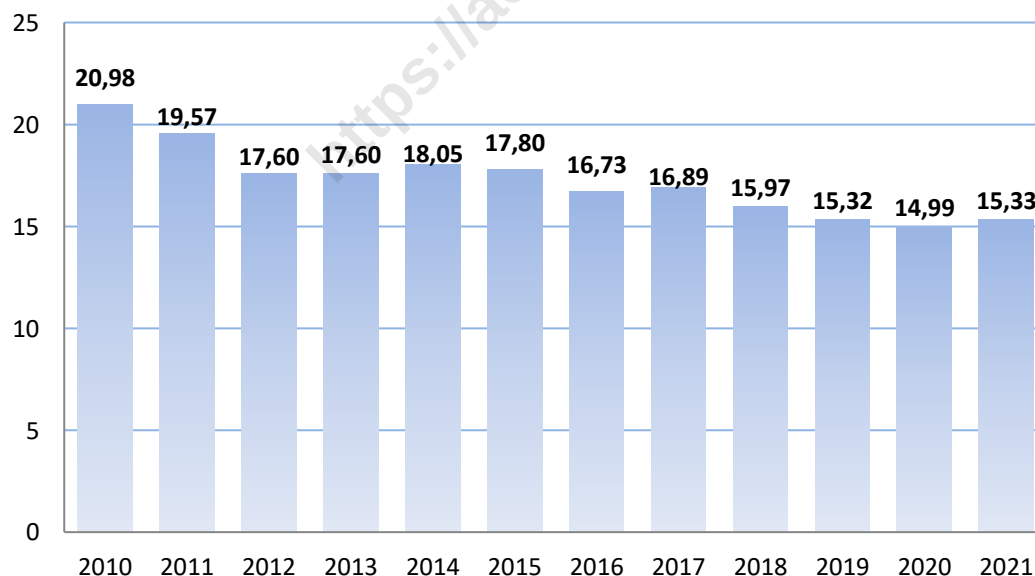
Di Provinsi Aceh proses persalinan yang dibantu tenaga medis pada tahun 2021 mencapai 98,66 persen. Capaian ini tentu saja menggembirakan karena hanya 1,34 persen penduduk di Aceh yang proses kelahiran bayinya tidak ditolong oleh tenaga medis, tetapi ditolong oleh dukun beranak/paraji. Gambar 3.5 menampilkan tren peningkatan persentase persalinan ditolong tenaga medis (dokter spesialis kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat) sejak tahun 2010 hingga 2021.

3.3 Capaian dan Tantangan di Bidang Ekonomi

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu penanganan kemiskinan. Sebagai salah satu masalah pokok dalam pembangunan yang sifatnya multiaspek sehingga Kemiskinan merupakan tantangan yang penanganannya juga perlu mendapat perhatian khusus. Kemiskinan dapat mengakibatkan individu masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan potensi dirinya, seperti contohnya dalam hal mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan faktor esensial dalam pembangunan manusia.

Meskipun tingkat kemiskinan tidak signifikan hubungannya dengan angka indeks pembangunan manusia, namun mencermati tingkat kemiskinan penduduk merupakan bagian dari tantangan pembangunan bidang sosial-ekonomi. Kecenderungan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh selama tahun 2010 hingga 2021 menunjukkan arah penurunan persentase namun juga disertai dengan fluktuasi naik-turun. Pada tahun 2021 kemiskinan mengalami sedikit peningkatan sebesar 15,33 persen dari tahun 2020 sebesar 14,99 persen (kondisi Maret).

Gambar 3.6 Tren Kemiskinan Provinsi Aceh, 2010-2021 (Maret)

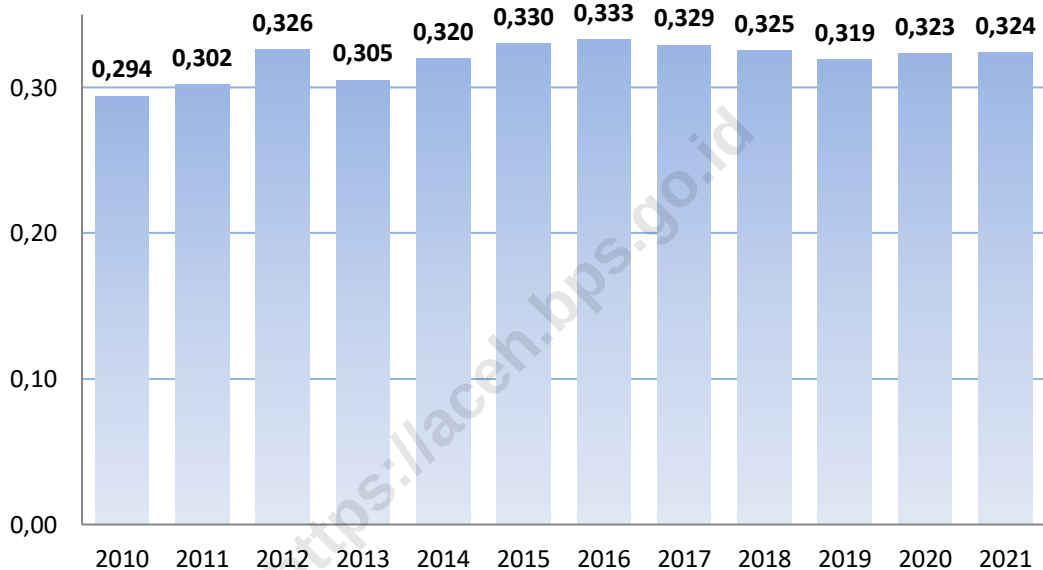


Sumber: Badan Pusat Statistik

Membahas lebih detil tentang kemiskinan, terdapat suatu indikator yang menjelaskan ukuran pemerataan pendapatan terhadap suatu wilayah. Indikator yang digunakan adalah Gini Rasio yang menggambarkan besar kecilnya ketimpangan

pendapatan penduduk. Semakin tinggi angka Gini Rasio, semakin lebar pula terjadi ketimpangan pendapatan antar penduduknya. Di Provinsi Aceh, angka indikator ini masih fluktuatif. Setelah sempat mencapai titik gini rasio yang rendah pada tahun 2010 (0,294), Gini Rasio Aceh pada tahun 2021 kembali mencapai angka 0,324 (Maret 2021). Hal ini bermakna bahwa terjadi pelebaran jarak antara pendapatan penduduk pada tahun 2021 dibanding kondisi tahun 2020.

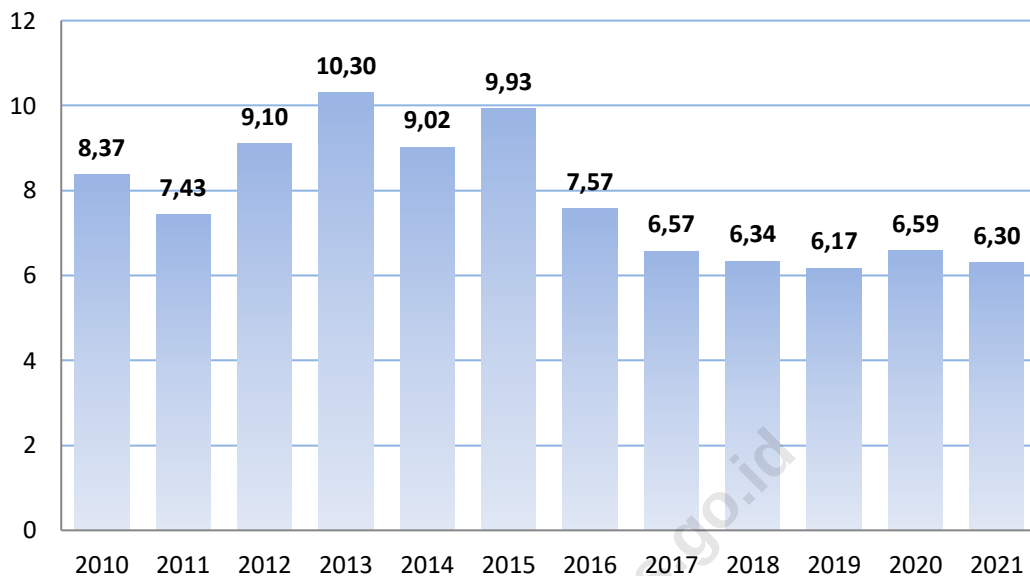
Gambar 3.7 Tren Gini Rasio Provinsi Aceh, 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain masalah kemiskinan, tantangan berikutnya dalam hal pembangunan ekonomi Aceh adalah masalah ketersediaan lapangan kerja versus jumlah tenaga kerja yang tersedia. Keterkaitan antara kemiskinan dan pengangguran dapat dikatakan cukup dekat karena memberi dampak luas dan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan angka kemiskinan, persentase pengangguran di Provinsi Aceh juga menunjukkan pergerakan yang belum stabil. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor musiman yang terjadi di perdesaan yaitu tenaga kerja di sektor pertanian.

Gambar 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh, 2010-2021 (Agustus)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2010 hingga 2015 terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan tingkat pengangguran di Aceh, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.8. Namun selanjutnya, tingkat pengangguran Aceh terus mengalami penurunan hingga menjadi 6,17 persen pada tahun 2019, namun mengalami sedikit peningkatan 6,59 persen pada tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021 tercatat sebesar 6,30 persen.

4

DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH

Kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota merupakan tantangan yang masih harus dihadapi pemerintah. Perhatian khusus perlu diberikan untuk kabupaten/kota dengan capaian IPM terendah seperti Subulussalam, Simeulue, dan Aceh Barat Daya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

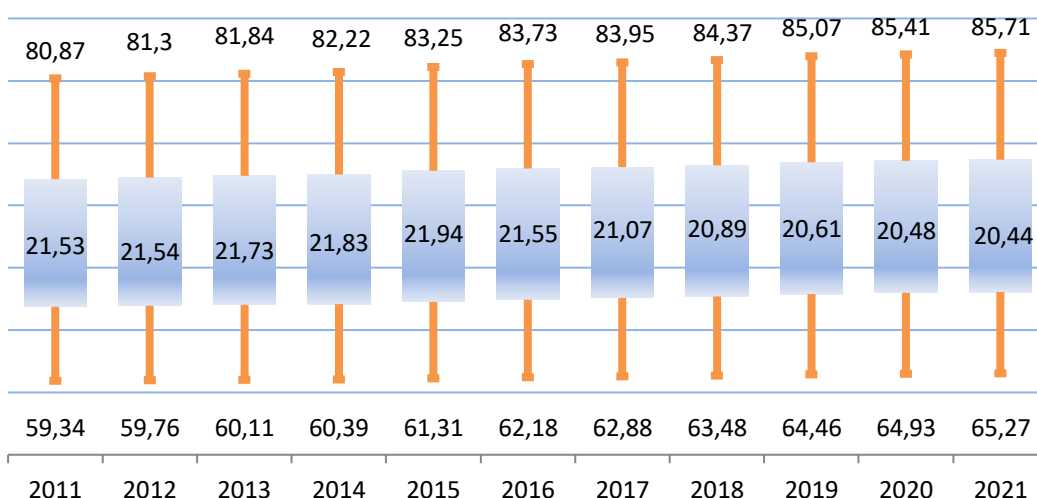
DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH

4.1 Disparitas IPM Antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh

Ketidakmerataan perkembangan maupun penyebaran program pembangunan tentunya berakibat pada ketimpangan yang terjadi di daerah. Kesenjangan ini merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu juga terdapat perbedaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Seperti telah dibahas bahwa perkembangan IPM Aceh dari tahun 2011-2021 terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan pembangunan manusia Aceh secara umum ini juga menggambarkan terjadinya kesenjangan antarkabupaten/kota. Hal ini disebabkan kabupaten/kota mempunyai kecepatan capaian komponen yang berbeda.

Disparitas pembangunan manusia di Aceh secara nyata menunjukkan terjadinya pelebaran kesenjangan antardaerah. Pada tahun 2011, disparitas antara IPM tertinggi yang dicapai oleh Kota Banda Aceh sebesar 80,87 dan IPM terendah yang terjadi di Kota Subulussalam sebesar 59,34, mencapai 21,53 poin. Namun jika diamati sejak 2016 hingga 2021, disparitas menunjukkan nilai yang menurun. Pada tahun 2021, disparitas antar IPM tertinggi yang dicapai oleh Kota Banda Aceh sebesar 85,71 dengan IPM terendah yang terjadi di Kota Subulussalam sebesar 65,27, mencapai 20,44 poin.

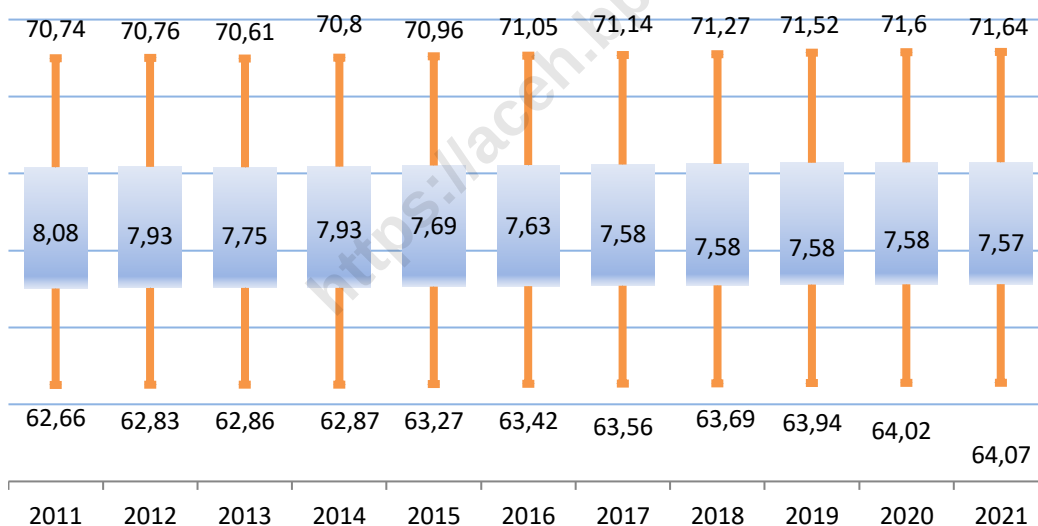
Gambar 4.1 Disparitas Pembangunan Manusia Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dinamika perubahan disparitas nilai IPM merupakan agregat dari naik-turunnya disparitas komponen pembentuk IPM. Untuk komponen hidup sehat, Umur Harapan Hidup masing-masing kabupaten/kota telah memotret bagaimana perbedaan tinggi-rendahnya komponen ini. Tren perbedaan UHH setiap tahunnya memperlihatkan adanya penurunan disparitas. Tahun 2011, UHH tertinggi dicapai oleh Kota Banda Aceh (70,74 tahun) yang berbeda sebanyak 8,08 poin dari UHH terendah yang dicapai oleh Kota Subulussalam (62,66 tahun). Pergeseran waktu yang disertai dengan adanya perbaikan atau penambahan fasilitas penunjang kebutuhan hidup sehat mengakibatkan disparitas UHH semakin menyempit. Pada tahun 2021, UHH tertinggi yang dimiliki oleh Kota Lhokseumawe sebesar 71,64 tahun terhadap UHH terendah yang dimiliki Kota Subulussalam (64,07 tahun) menghasilkan disparitas sebesar 7,57 poin.

Gambar 4.2 Disparitas Umur Harapan Hidup antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2021

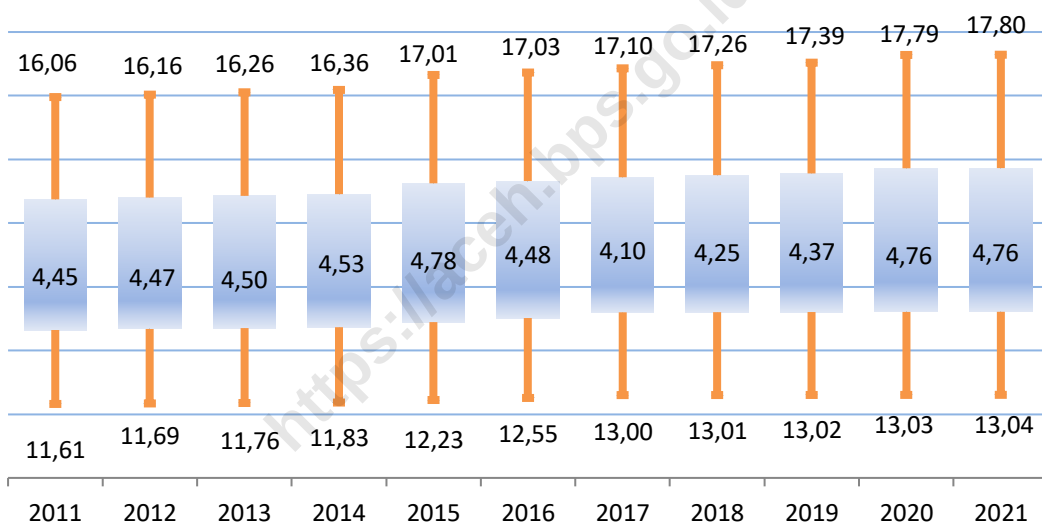


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya dikaji bagaimana perbedaan antardaerah di Aceh pada aspek pendidikan. Pada penghitungan IPM, komponen Harapan Lama Sekolah telah dihitung sesuai dengan pendekatan dari data hasil Susenas. Tapi kabupaten/kota dengan program pembangunannya masing-masing akan memperlihatkan hasil realisasi kerja pemerintahannya melalui indikator-indikator yang terukur pada aspek-aspek pembangunannya.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang masuk dalam skala prioritas program pembangunan daerah. Namun, dari segi kualitas pembangunan manusia pada aspek ini, kesenjangan antara daerah yang sudah lebih baik komponen pendidikannya dibandingkan dengan daerah yang belum berkembang menjadi semakin melebar. Seperti terlihat pada Gambar 4.3, disparitas HLS antar kabupaten/kota di Aceh semakin besar dari tahun ke tahun. Tahun 2021, jarak antara HLS tertinggi (Kota Banda Aceh: 17,80 tahun) dan HLS terendah (Kabupaten Aceh Timur: 13,04 tahun) adalah sebesar 4,76 poin. Angka tersebut sama dengan jika dibandingkan disparitas HLS tahun 2020.

Gambar 4.3 Disparitas Harapan Lama Sekolah antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2021

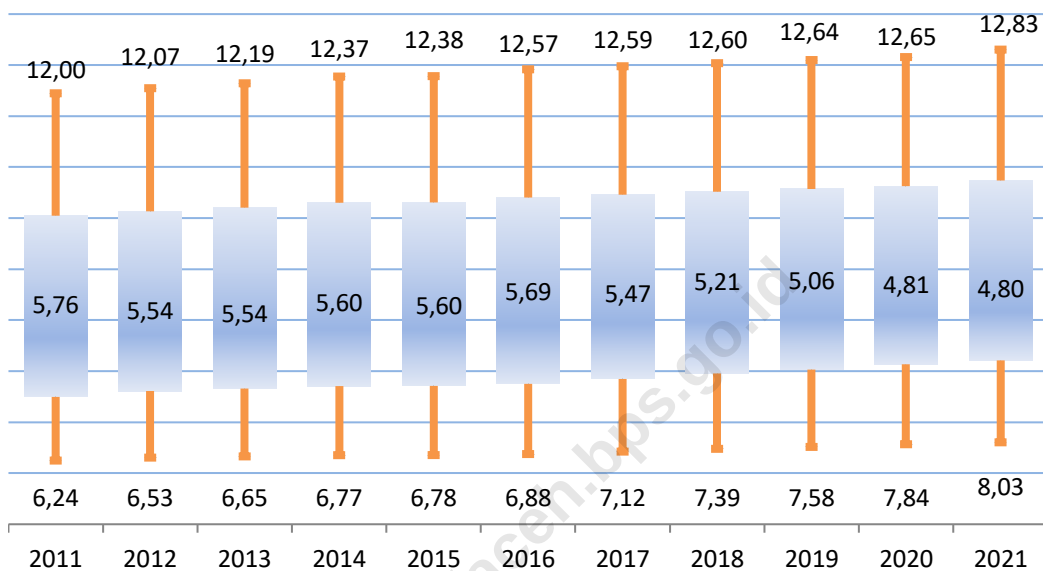


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya adalah disparitas komponen rata-rata lama sekolah yang disajikan dalam Gambar 4.4. Berbeda dengan komponen HLS yang disparitasnya semakin melebar setiap tahunnya, komponen RLS justru menyatakan bahwa perbedaan antarkabupaten/kota cenderung semakin mengecil. Pada tahun 2011, disparitas rata-rata lama sekolah antara daerah yang tertinggi RLS-nya (Banda Aceh: 12,00 tahun) dibandingkan dengan daerah yang paling rendah RLS-nya (Gayo Lues: 6,24 tahun) adalah sebesar 5,76 tahun. Artinya, pada tahun tersebut, ketika penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Banda Aceh bersekolah menyelesaikan jenjang SLTA, penduduk di Kabupaten Gayo Lues justru hanya menikmati bangku sekolah sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Pada tahun 2021, disparitas RLS menurun menjadi 4,80 poin, yaitu

perbedaan antara RLS di Kota Banda Aceh (12,83 tahun) dengan RLS di Kota Subulussalam (8,03 tahun).

Gambar 4.4 Disparitas Rata-Rata Lama Sekolah antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2021

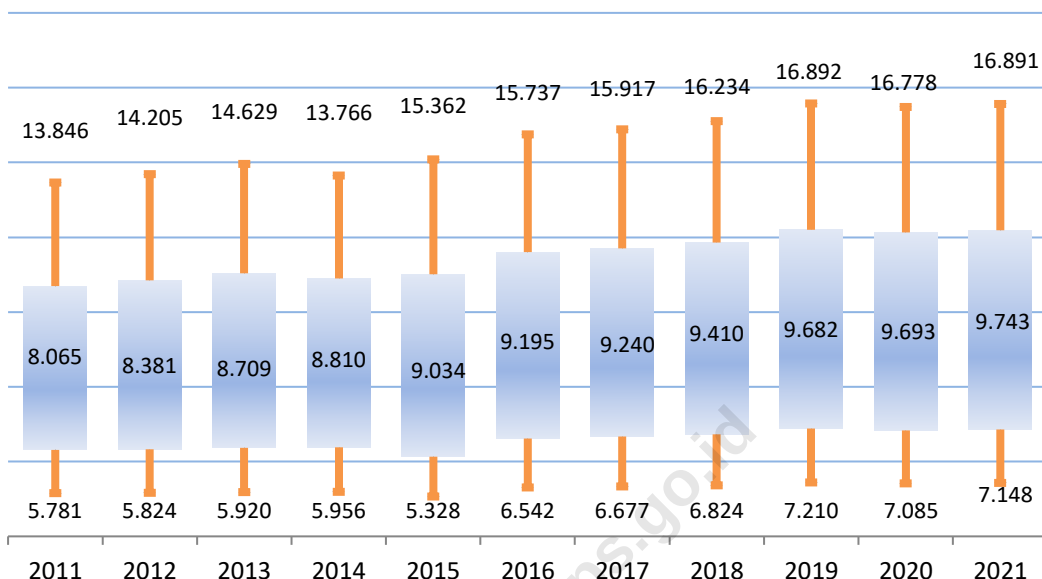


Sumber: Badan Pusat Statistik

Beralih ke komponen IPM selanjutnya, ketimpangan pembangunan manusia pada komponen standar hidup layak dapat ditinjau dari besarnya perbedaan antardaerah pada indikator pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP). Keberagaman perkembangan atau pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota memunculkan kondisi perekonomian yang mempunyai tingkatan yang tidak sama.

Disparitas PPP penduduk di Aceh pada tahun 2011 adalah sebesar 8,07 juta rupiah. Hal ini adalah rentang perbedaan antara daerah yang memiliki PPP tertinggi yaitu Kota Banda Aceh (13,846 juta rupiah) dibandingkan dengan Kabupaten Simeulue yang mencapai PPP terendah (5,781 juta rupiah). Sama halnya dengan beberapa komponen IPM lainnya yang mengalami disparitas dari tahun ke tahun, pada dimensi standar hidup layak juga menunjukkan rentang yang semakin melebar dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Bahkan disparitas PPP pada tahun 2021 mencapai 9,74 juta rupiah, yaitu perbedaan antara PPP Kota Banda Aceh dan PPP Kabupaten Simeulue.

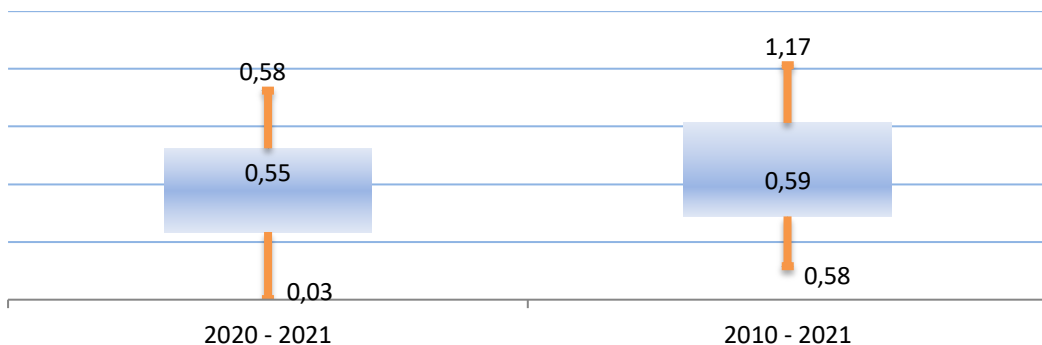
Gambar 4.5 Disparitas Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh, 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembahasan disparitas IPM tidak hanya dapat ditilik dari kesenjangan pada aspek-aspek pembentuk IPM saja. Akan tetapi, kesenjangan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari perbedaan laju pertumbuhan IPM masing-masing kabupaten/kota. Ilustrasi perbedaan variasi pertumbuhan IPM antarkabupaten/kota disajikan pada Gambar 4.6, menggambarkan pertumbuhan pembangunan manusia pada periode tahun 2010-2021 dan tahun 2020 - 2021.

Gambar 4.6 Disparitas Pertumbuhan IPM Antarkabupaten di Provinsi Aceh, 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Terlihat bahwa disparitas pertumbuhan IPM di Aceh pada periode tahun 2020-2021 (0,55 poin) sedikit lebih rendah dari disparitas pertumbuhan IPM pada periode tahun 2010-2021 (0,59 poin). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan IPM tahun 2021 terhadap IPM 2020 bervariasi antarkabupaten/kota sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2010-2021. Semakin sempit perbedaan/disparitas pertumbuhan IPM, semakin merata kecepatan pembangunan manusia menuju ideal antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh.

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

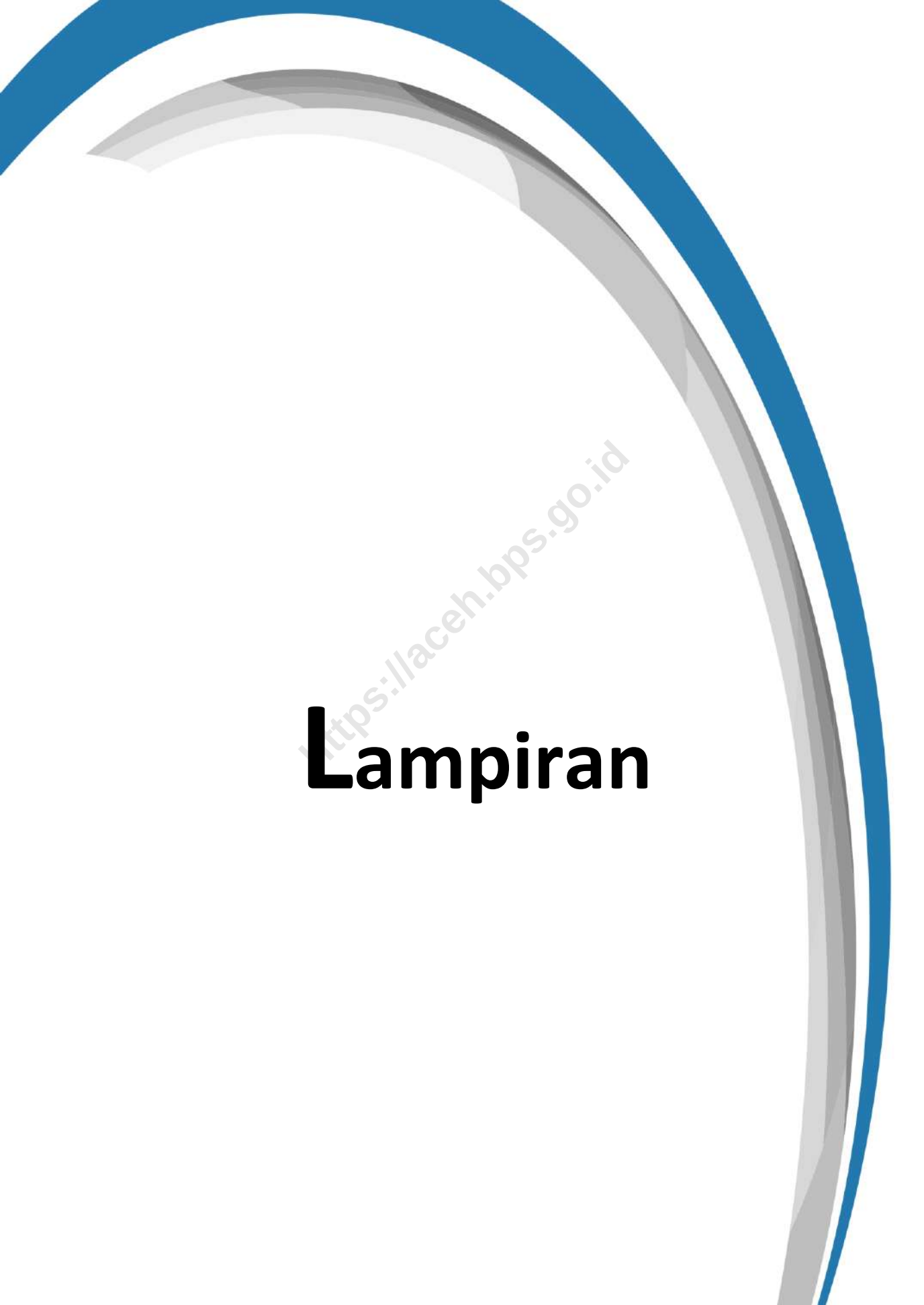
- Badan Pusat Statistik (2022). **Indeks Pembangunan Manusia 2021**.
- Badan Pusat Statistik (2021). **Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2021**.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2021). **Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2021**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2020). **Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2020**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2021). **Statistik Kesehatan Provinsi Aceh 2020**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2021). **Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Agustus 2021**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2021). **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2021**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2022). **Provinsi Aceh Dalam Angka 2021**. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2021). **Provinsi Aceh Dalam Angka 2020**. Banda Aceh.
- H. Preston, Samuel, et. all. (2004). **Demography: Measuring and Modelling Population Processes**. USA: Blackwell.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan BPS (2008). **Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007**. Jakarta
- UNDP, BPS, dan Bappeda Aceh. (2010). **Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010: Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat**. Jakarta
- United Nations Development Programme (2016). **Human Development Report**. New York: UNDP
- (2017). **Human Development Report**. New York: UNDP.
- (2018). **Human Development Report**. New York: UNDP.
- (2019). **Human Development Report**. New York: UNDP.

----- (2020). **Human Development Report**. New York: UNDP.

----- (2021). **Human Development Report**. New York: UNDP.
<http://id.wikipedia.org>

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

Lampiran 1. Umur Harapan Hidup Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69,15	69,23	69,31	69,35	69,50	69,51	69,52	69,64	69,87	69,93	69,96
01. Simeulue	64,15	64,22	64,23	64,24	64,66	64,78	64,90	65,00	65,22	65,26	65,28
02. Aceh Singkil	66,76	66,85	66,91	66,94	66,97	67,02	67,07	67,16	67,36	67,39	67,43
03. Aceh Selatan	63,03	63,12	63,16	63,18	63,61	63,75	63,89	64,02	64,27	64,35	64,40
04. Aceh Tenggara	66,93	66,96	67,03	67,07	67,40	67,51	67,62	67,77	68,04	68,14	68,22
05. Aceh Timur	67,97	68,02	68,05	68,06	68,20	68,26	68,33	68,44	68,67	68,72	68,74
06. Aceh Tengah	68,27	68,30	68,35	68,38	68,44	68,48	68,53	68,62	68,82	68,85	68,86
07. Aceh Barat	67,21	67,25	67,30	67,33	67,49	67,56	67,62	67,72	67,93	67,98	67,99
08. Aceh Besar	69,38	69,41	69,44	69,46	69,47	69,49	69,52	69,59	69,77	69,78	69,79
09. Pidie	66,20	66,25	66,27	66,28	66,46	66,52	66,58	66,68	66,89	66,94	66,95
10. Bireuen	70,30	70,32	70,34	70,35	70,64	70,72	70,80	70,92	71,16	71,22	71,26
11. Aceh Utara	68,36	68,40	68,41	68,42	68,48	68,51	68,54	68,61	68,79	68,80	68,81
12. Aceh Barat Daya	63,55	63,63	63,69	63,72	64,20	64,35	64,51	64,65	64,91	65,00	65,06
13. Gayo Lues	64,31	64,38	64,42	64,44	64,77	64,88	64,98	65,12	65,38	65,47	65,53
14. Aceh Tamiang	68,61	68,65	68,66	68,67	68,99	69,08	69,16	69,28	69,52	69,58	69,63
15. Nagan Raya	68,24	68,26	68,28	68,29	68,59	68,67	68,76	68,89	69,14	69,22	69,24
16. Aceh Jaya	66,35	66,39	66,45	66,48	66,63	66,70	66,77	66,88	67,11	67,16	67,19
17. Bener Meriah	68,56	68,58	68,62	68,64	68,79	68,85	68,90	68,99	69,19	69,22	69,26
18. Pidie Jaya	69,05	69,07	69,11	69,13	69,49	69,59	69,68	69,81	70,06	70,14	70,18
71. Banda Aceh	70,74	70,76	70,79	70,80	70,89	70,92	70,96	71,10	71,36	71,45	71,52
72. Sabang	69,54	69,54	69,54	69,54	69,93	70,01	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56
73. Langsa	68,70	68,75	68,78	68,79	68,94	69,00	69,06	69,16	69,37	69,42	69,43
74. Lhokseumawe	70,57	70,59	70,61	70,62	70,96	71,05	71,14	71,27	71,52	71,60	71,64
75. Subulussalam	62,66	62,83	62,86	62,87	63,27	63,42	63,56	63,69	63,94	64,02	64,07

Lampiran 2. Harapan Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	13,03	13,19	13,36	13,53	13,73	13,89	14,13	14,27	14,30	14,31	14,36
01. Simeulue	12,66	12,67	12,67	12,75	12,83	13,07	13,23	13,25	13,51	13,76	13,90
02. Aceh Singkil	12,84	13,49	13,85	14,05	14,26	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32
03. Aceh Selatan	12,51	12,57	13,01	13,05	13,24	13,53	13,80	14,15	14,41	14,42	14,60
04. Aceh Tenggara	12,66	13,18	13,54	13,59	13,62	13,96	13,97	13,98	13,99	14,00	14,01
05. Aceh Timur	11,61	11,69	11,76	11,83	12,23	12,55	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04
06. Aceh Tengah	13,49	13,55	13,76	14,11	14,21	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27	14,28
07. Aceh Barat	14,27	14,29	14,32	14,35	14,55	14,56	14,57	14,58	14,59	14,60	14,61
08. Aceh Besar	13,91	13,91	14,21	14,35	14,47	14,48	14,49	14,70	14,71	14,72	14,73
09. Pidie	13,07	13,21	13,36	13,50	13,61	13,93	14,25	14,44	14,45	14,46	14,47
10. Bireuen	13,83	14,03	14,22	14,25	14,41	14,42	14,80	14,81	14,82	14,83	14,84
11. Aceh Utara	13,69	13,77	13,89	13,99	14,10	14,11	14,42	14,68	14,69	14,70	14,71
12. Aceh Barat Daya	12,94	12,98	13,02	13,11	13,20	13,54	13,55	13,56	13,57	13,58	13,65
13. Gayo Lues	12,77	12,89	13,01	13,03	13,13	13,27	13,28	13,49	13,73	13,77	13,78
14. Aceh Tamiang	12,34	12,57	12,79	13,27	13,54	13,55	13,56	13,57	13,58	13,59	13,76
15. Nagan Raya	13,20	13,27	13,34	13,42	14,04	14,09	14,10	14,11	14,12	14,13	14,14
16. Aceh Jaya	12,51	13,30	13,69	13,81	13,93	13,94	13,95	13,96	13,97	13,98	13,99
17. Bener Meriah	12,69	12,78	12,93	13,02	13,04	13,42	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47
18. Pidie Jaya	13,70	13,76	13,92	14,03	14,14	14,51	14,52	14,53	14,54	14,82	14,97
71. Banda Aceh	16,06	16,16	16,26	16,36	17,01	17,03	17,10	17,26	17,39	17,79	17,80
72. Sabang	11,91	12,07	12,23	12,39	12,98	13,17	13,58	13,66	13,81	13,95	14,13
73. Langsa	13,61	13,93	14,25	14,58	15,16	15,17	15,18	15,19	15,34	15,35	15,63
74. Lhokseumawe	14,23	14,91	14,92	15,11	15,14	15,16	15,17	15,18	15,19	15,20	15,21
75. Subulussalam	12,89	13,03	13,16	13,30	13,73	14,18	14,19	14,20	14,21	14,61	14,62

Lampiran 3. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	8,32	8,36	8,44	8,71	8,77	8,86	8,98	9,09	9,18	9,33	9,37
01. Simeulue	8,26	8,34	8,55	8,89	8,90	8,91	9,06	9,07	9,08	9,34	9,48
02. Aceh Singkil	6,86	7,16	7,33	7,48	7,50	7,69	7,84	8,05	8,52	8,53	8,68
03. Aceh Selatan	7,53	7,56	7,59	7,60	7,79	8,02	8,33	8,38	8,59	8,87	8,88
04. Aceh Tenggara	8,45	8,57	8,58	8,77	9,32	9,33	9,63	9,64	9,65	9,66	9,67
05. Aceh Timur	7,09	7,13	7,28	7,38	7,40	7,60	7,80	7,85	7,86	8,15	8,21
06. Aceh Tengah	9,13	9,19	9,25	9,31	9,65	9,66	9,67	9,68	9,69	9,85	9,86
07. Aceh Barat	7,71	7,77	7,83	8,17	8,47	8,70	9,04	9,08	9,09	9,37	9,55
08. Aceh Besar	9,44	9,45	9,46	9,61	9,91	9,92	9,93	10,14	10,31	10,32	10,33
09. Pidie	7,96	8,08	8,15	8,25	8,74	8,75	8,76	8,81	8,82	8,99	9,00
10. Bireuen	8,45	8,50	8,58	8,85	9,14	9,15	9,16	9,17	9,27	9,28	9,29
11. Aceh Utara	7,39	7,69	7,83	8,06	8,07	8,09	8,10	8,11	8,46	8,63	8,64
12. Aceh Barat Daya	7,49	7,53	7,69	7,89	7,90	7,93	8,12	8,13	8,35	8,66	8,67
13. Gayo Lues	6,24	6,88	7,00	7,04	7,06	7,10	7,39	7,69	7,91	8,20	8,40
14. Aceh Tamiang	7,64	7,66	7,69	7,71	7,95	8,21	8,47	8,70	8,89	8,90	8,91
15. Nagan Raya	7,32	7,73	7,78	7,93	8,22	8,24	8,25	8,26	8,50	8,68	8,69
16. Aceh Jaya	7,34	7,64	7,70	7,88	7,89	7,95	8,13	8,37	8,66	8,70	8,71
17. Bener Meriah	8,22	8,63	8,93	9,00	9,42	9,43	9,55	9,56	9,78	9,79	10,00
18. Pidie Jaya	7,90	7,93	7,95	8,30	8,45	8,46	8,84	8,86	9,04	9,33	9,34
71. Banda Aceh	12,00	12,07	12,19	12,37	12,38	12,57	12,59	12,60	12,64	12,65	12,83
72. Sabang	10,12	10,16	10,21	10,35	10,37	10,51	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18
73. Langsa	10,38	10,43	10,47	10,48	10,49	10,71	10,90	11,06	11,10	11,11	11,12
74. Lhokseumawe	10,08	10,16	10,37	10,39	10,41	10,53	10,88	10,89	10,90	10,91	11,11
75. Subulussalam	6,41	6,53	6,65	6,77	6,78	6,88	7,12	7,39	7,58	7,84	8,03

Lampiran 4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)
Aceh	8.044	8.134	8.289	8.297	8.533	8.768	8.957	9.186	9.603	9.492	9.572
01. Simeulue	5.781	5.824	5.920	5.956	6.328	6.542	6.677	6.824	7.210	7.085	7.148
02. Aceh Singkil	7.123	7.165	7.208	7.221	7.602	8.068	8.230	8.506	8.715	8.707	8.776
03. Aceh Selatan	6.890	6.913	6.989	7.003	7.224	7.397	7.567	7.891	8.187	8.089	8.180
04. Aceh Tenggara	6.731	6.788	6.899	6.949	7.001	7.212	7.359	7.685	8.067	8.020	8.030
05. Aceh Timur	6.897	7.178	7.219	7.288	7.623	7.825	7.961	8.252	8.600	8.489	8.577
06. Aceh Tengah	9.330	9.365	9.400	9.435	9.473	9.920	10.021	10.394	10.782	10.673	10.780
07. Aceh Barat	7.632	7.688	7.744	7.771	8.135	8.559	8.989	9.134	9.692	9.516	9.593
08. Aceh Besar	8.246	8.344	8.497	8.622	8.775	8.788	8.965	9.192	9.661	9.641	9.644
09. Pidie	9.076	9.121	9.167	9.182	9.233	9.273	9.377	9.492	9.824	9.816	9.860
10. Bireuen	6.822	6.996	7.232	7.319	7.622	7.885	8.237	8.378	8.889	8.857	8.867
11. Aceh Utara	6.465	6.562	6.714	6.838	7.327	7.520	7.632	7.919	8.189	8.122	8.201
12. Aceh Barat Daya	6.655	6.828	6.966	7.059	7.303	7.567	7.723	8.093	8.491	8.316	8.428
13. Gayo Lues	7.635	7.646	7.709	7.742	7.780	8.048	8.322	8.529	8.845	8.791	8.856
14. Aceh Tamiang	7.455	7.478	7.554	7.569	7.750	7.766	7.931	8.032	8.362	8.327	8.367
15. Nagan Raya	6.834	6.902	7.019	7.084	7.141	7.460	7.732	7.936	8.348	8.216	8.292
16. Aceh Jaya	8.596	8.679	8.691	8.721	8.749	8.796	8.322	9.262	9.682	9.615	9.666
17. Bener Meriah	9.289	9.580	9.645	9.721	9.760	10.140	10.428	10.626	11.124	11.098	11.118
18. Pidie Jaya	8.935	9.027	9.173	9.260	9.398	9.590	9.691	9.967	10.364	10.071	10.290
71. Banda Aceh	13.846	14.205	14.629	14.766	15.362	15.737	15.917	16.234	16.892	16.778	16.891
72. Sabang	9.254	9.692	9.718	9.823	10.041	10.507	10.610	10.899	11.444	11.273	11.378
73. Langsa	9.713	9.925	10.198	10.284	10.605	11.015	11.261	11.497	12.099	12.057	12.067
74. Lhokseumawe	8.900	9.303	9.580	9.678	10.093	10.549	10.673	10.863	11.421	11.367	11.390
75. Subulussalam	6.230	6.275	6.320	6.326	6.504	6.669	6.887	7.039	7.463	7.317	7.385

Lampiran 5. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2021

Propinsi/ Kabupaten/Kota	Tahun										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	0,54	0,53	0,72	0,75	0,93	0,79	0,85	0,84	1,00	0,13	0,26
01. Simeulue	0,71	0,36	0,70	0,81	1,58	1,04	0,92	0,51	1,48	0,50	0,58
02. Aceh Singkil	1,23	1,74	1,00	0,62	1,20	1,38	0,61	0,96	1,31	0,04	0,41
03. Aceh Selatan	0,49	0,28	0,94	0,13	1,49	1,34	1,40	1,37	1,49	0,33	0,48
04. Aceh Tenggara	0,71	1,12	0,86	0,53	1,32	1,06	0,90	0,85	1,00	0,01	0,10
05. Aceh Timur	0,97	0,93	0,54	0,47	1,54	1,35	1,37	0,75	0,85	0,36	0,30
06. Aceh Tengah	1,20	0,26	0,47	0,64	0,78	0,74	0,20	0,62	0,69	0,14	0,18
07. Aceh Barat	0,64	0,29	0,30	0,67	1,63	1,24	1,35	0,38	1,06	0,22	0,41
08. Aceh Besar	0,26	0,23	0,73	0,64	0,90	0,07	0,34	1,01	1,13	0,01	0,03
09. Pidie	0,30	0,52	0,43	0,41	1,19	0,55	0,66	0,59	0,69	0,31	0,10
10. Bireuen	0,92	0,81	0,98	0,70	1,54	0,63	1,28	0,37	1,26	0,01	0,07
11. Aceh Utara	1,04	0,93	0,83	0,87	1,40	0,51	0,71	1,02	1,26	0,16	0,19
12. Aceh Barat Daya	1,38	0,65	0,76	0,73	1,09	1,25	0,80	0,89	1,36	0,29	0,36
13. Gayo Lues	1,61	1,52	0,59	0,19	0,52	0,93	1,16	1,34	1,50	0,52	0,51
14. Aceh Tamiang	0,34	0,49	0,54	0,81	1,42	0,57	0,86	0,68	1,14	0,01	0,35
15. Nagan Raya	1,05	1,04	0,49	0,54	1,75	0,88	0,68	0,55	1,41	0,10	0,19
16. Aceh Jaya	0,65	1,92	0,75	0,57	0,34	0,25	0,54	1,12	1,32	0,01	0,13
17. Bener Meriah	1,41	1,32	0,87	0,37	0,89	1,13	0,65	0,35	1,15	0,01	0,40
18. Pidie Jaya	0,45	0,31	0,52	0,91	0,86	0,91	0,84	0,54	1,04	0,45	0,55
71. Banda Aceh	0,63	0,53	0,66	0,46	1,25	0,58	0,26	0,50	0,83	0,40	0,35
72. Sabang	0,65	0,98	0,32	0,61	1,41	1,17	1,00	0,97	1,27	0,01	0,44
73. Langsa	0,50	0,83	0,89	0,56	1,26	0,90	0,63	0,59	1,07	0,01	0,35
74. Lhokseumawe	1,12	1,66	0,79	0,42	0,90	0,89	0,73	0,37	0,89	0,01	0,34
75. Subulussalam	0,63	0,71	0,59	0,47	1,54	1,40	1,12	0,95	1,54	0,73	0,52

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>



Catatan Teknis

<https://laci.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA

"Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang."

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama kali dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi - sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan

jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi, distribusi komoditas, dan peningkatan serta pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat - pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural - dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak (Gambar A). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

UMUR HARAPAN HIDUP

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation), jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan AMH (Anak Masih Hidup). Paket program mortpack digunakan untuk menghitung umur harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model *West*, yang sesuai histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (preston, 2004)

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah memiliki bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara (UNDP). Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang di tunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity), berbasis formula :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^M \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad (1)$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j.

P_{ij} : harga komoditas I di kabupaten/kota i.

Catatan Teknis

Pik : harga komoditas I di jakarta selatan.

M : jumlah komoditas.

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel A. Batas maksimum dan minimum penghitungan per kapita yang digunakan dalam perhitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel B. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.35 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel A Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung Terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/Singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tonkol/Tuna/Cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	The	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya (batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis /roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campu/remes	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/Pengangkutan Umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie goreng/mie rebus	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikan (goreng/bakar/dll)	Pakaian jadi anak-anak

Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan rumah tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Rokok kretek filter	Alat dapur/makan



Gambar A

Diagram
Penghitungan IPM

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \quad (4)$$

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{min})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel B.

Tabel B Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 010 (data empiris) yaitu Tolikara – Papua
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita jakarta selatan 2025.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Kelompok “sangat tinggi” | :IPM ≥ 80 |
| 2. Kelompok “tinggi” | :70 ≤ IPM < 80 |
| 3. Kelompok “sedang” | :60 ≤ IPM < 70 |
| 4. Kelompok “rendah” | :IPM < 60 |

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

<https://aceh.bps.go.id>

DEFINISI ISTILAH ISTILAH STATISTIK

Anak Lahir Hidup

Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya.

Anak Masih Hidup

Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan.

Angka Buta Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dihitung dengan cara 100 dikurangi dengan angka melek huruf (dewasa).

Umur Harapan Hidup pada waktu lahir (e_0)

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Melek Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka Putus Sekolah

Proporsi dari penduduk berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama.

Garis Kemiskinan

Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar kebutuhan-kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk dapat hidup secara layak.

Gross Enrollment Ratio (GER)

Jumlah pelajar yang terdaftar di suatu tingkat pendidikan, tanpa memperhatikan umur, sebagai persentase terhadap jumlah populasi usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan tersebut. Net enrollment ratio adalah jumlah pelajar pada kisaran usia sekolah resmi terdaftar di tingkat pendidikan tertentu sebagai persentase dari jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan tersebut. Usia sekolah resmi di Indonesia adalah 7-12 tahun untuk sekolah dasar, 13-15 tahun untuk sekolah menengah pertama, 16-18 tahun untuk sekolah menengah atas, dan 19-24 tahun untuk perguruan tinggi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks yang menunjukkan perbandingan relatif antara tingkat harga pada saat bulan survei dan tingkat harga pada sebelumnya, yang ditimbang dengan nilai konsumsi pada kedua bulan tersebut. IHK dihitung dengan formula Laspeyres yang dimodifikasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur

berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Mortalitas

Keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Jumlah nilai tambah bruto (total output dari barang dan jasa) yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi di suatu negara selama periode waktu tertentu.

Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber dayayang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Penduduk Miskin

Jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran per kapita berada di bawah suatu ambang batas tertentu yang dinyatakan sebagai garis kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan relatif nilai riil produk domestik bruto dalam suatu periode tertentu.

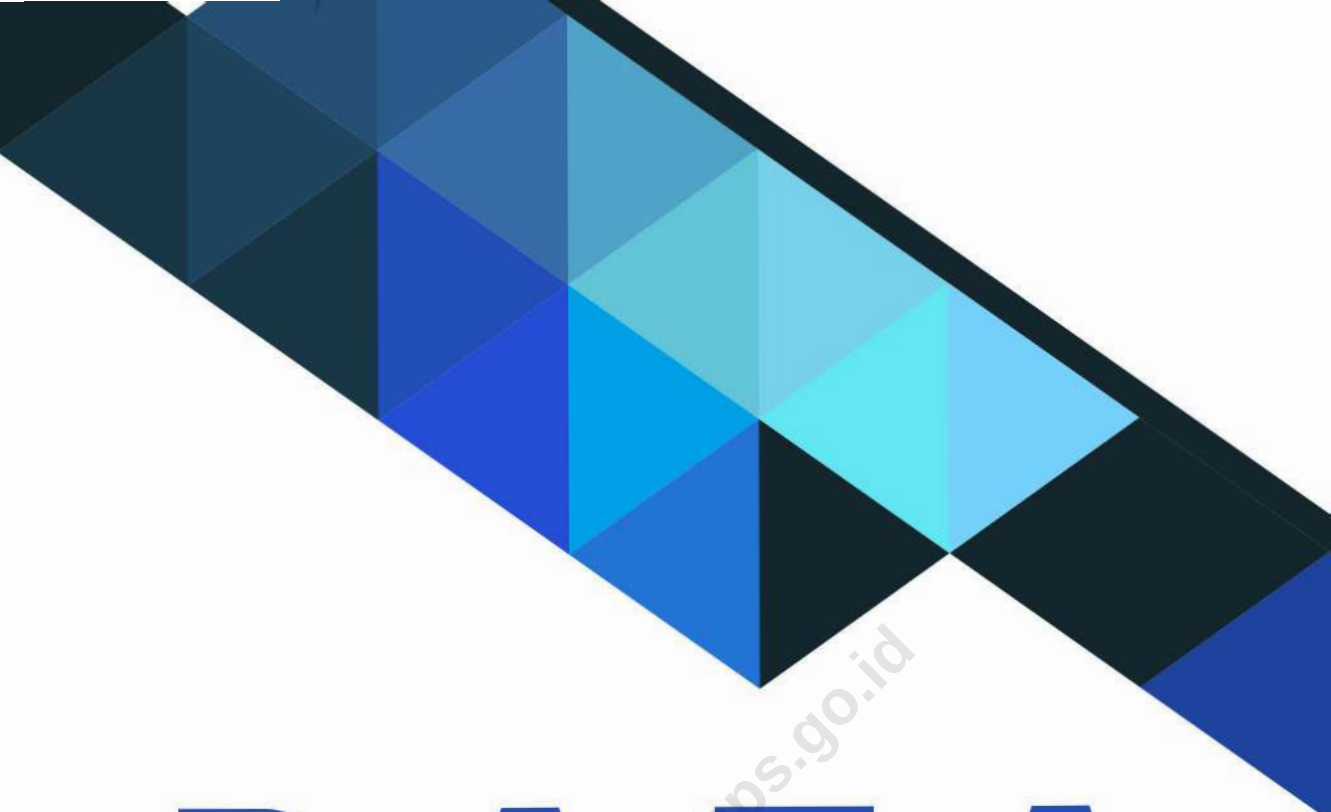
Purchasing Power Parity (PPP)

Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai paritas daya beli, yang memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antarprovinsi dan antarkabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia,

satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan kegunaan (utilitas) marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.

Rata rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jl. Tgk. H. M. Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121
Telp (0651) 23005 Faks (0651) 33632
Email: aceh@bps.go.id, Website: aceh.bps.go.id



9 772477 465002